



2024



KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MADIUN

• Tahun Anggaran 2024 •

KATA PENGANTAR

Kompilasi Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 merupakan publikasi resmi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Publikasi ini menampilkan kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun selama periode Tahun 2018 s.d Tahun 2023. Kompilasi data statistik bersifat netral/tidak memihak dan diperuntukkan bagi semua pengguna data serta bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar.

Kompilasi Data Statistik Sektoral ini menyajikan data sektoral dengan pembagian berdasarkan Perangkat Daerah. Data-data Perangkat Daerah dikelompokkan berdasarkan sumber datanya yaitu data yang bersumber dari 5 (lima) Agenda Prioritas Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur.

Dengan disusunnya Kompilasi Data Statistik Sektoral ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Buku Kompilasi Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024. Dalam penyusunan Buku Kompilasi Data Statistik Sektoral ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diperlukan demi penyempurnaan kedepannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada instansi pemerintah, masyarakat dan pengguna data lainnya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	21
6. Dinas Pertanian dan Perikanan	24
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	26
8. Dinas Lingkungan Hidup	28
9. Dinas Perhubungan	31
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	35
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43
13. Dinas Kesehatan	53
14. Dinas Sosial	124
15. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	147
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	165
18. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	168
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	175
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	181
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	183
23. Badan Pendapatan Daerah	189
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	191
25. Inspektorat	193
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	196
27. Sekretariat DPRD	200
28. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban	202
29. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo	203
30. Sekretariat Daerah	204
31. Kecamatan	209
32. Badan Pusat Statistik	215

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Indikator SDGs	2
Tabel 1.2	Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Indikator LPPD	3
Tabel 1.3	Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Indikator Renstra	3
Tabel 1.3.1	Data Persentase Keluarga Sejahtera per Kecamatan	4
Tabel 1.4	Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Indikator RPJMD	5
Tabel 2.1	Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Indikator LPPD	7
Tabel 2.1.1	Data Persentase Perekaman KTP Elektronik per Kecamatan	8
Tabel 2.1.2	Data Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA per Kecamatan	9
Tabel 2.1.3	Data Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran per Kecamatan	10
Tabel 2.2	Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Indikator RPJMD	11
Tabel 2.2.1	Data Persentase Penduduk yang Sudah Menerima Dokumen Kependudukan per Kecamatan	12
Tabel 2.2.2	Data Persentase Penduduk yang Sudah Memiliki Dokumen Kependudukan per Kecamatan	13
Tabel 2.2.3	Data Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil per Kecamatan	14
Tabel 3.1	Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Indikator LPPD	16
Tabel 3.2	Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Indikator RPJMD	16
Tabel 3.3	Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Indikator SDGs	17
Tabel 3.3.1	Data Jumlah Desa Mandiri per Kecamatan	17
Tabel 4.1	Data Statistik Sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Indikator LPPD	19

Tabel 4.1.1	Perhitungan Persentase Peningkatan Investasi	19
Tabel 4.2	Data Statistik Sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Indikator RPJMD	20
Tabel 5.1	Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menurut Indikator LPPD	22
Tabel 5.2	Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menurut Indikator SDGs	22
Tabel 5.3	Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menurut Indikator RPJMD	23
Tabel 6.1	Data Statistik Sektoral Dinas Pertanian dan Perikanan Menurut Indikator LPPD	24
Tabel 6.1.1	Perhitungan Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	25
Tabel 6.2	Data Statistik Sektoral Dinas Pertanian dan Perikanan Menurut Indikator RPJMD	25
Tabel 7.1	Data Statistik Sektoral Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Menurut Indikator LPPD	26
Tabel 7.2	Data Statistik Sektoral Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Menurut Indikator RPJMD	27
Tabel 8.1	Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Menurut Indikator LPPD	28
Tabel 8.2	Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Menurut Indikator RPJMD	29
Tabel 8.2.1	Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	30
Tabel 8.3	Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Menurut Indikator SDGs	30
Tabel 9.1	Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan Menurut Indikator LPPD	31
Tabel 9.2	Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan Menurut Indikator RPJMD	32
Tabel 10.1	Data Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Menurut Indikator LPPD	33
Tabel 10.2	Data Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Menurut Indikator RPJMD	34
Tabel 10.2.1	Perhitungan Persentase Perpustakaan Terakreditasi ...	34
Tabel 11.1	Data Statistik Sektoral Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Indikator LPPD	35
Tabel 11.2	Data Statistik Sektoral Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Indikator RPJMD	36

Tabel 11.2.1	Data Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani per Kecamatan	37
Tabel 11.3	Data Statistik Sektoral Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Indikator SPM	38
Tabel 11.4.1	Data Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan	39
Tabel 11.4.2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan	40
Tabel 11.4.3	Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam Menurut Kecamatan	41
Tabel 11.4.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut Kecamatan	42
Tabel 12.1	Data Statistik Sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Indikator RPJMD	44
Tabel 12.1.1	Perhitungan Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	45
Tabel 12.1.2	Perhitungan Persentase Perluasan Akses Pelayanan Air Bersih (SR)	45
Tabel 12.1.3	Perhitungan Persentase Sarana Limbah Domestik Setempat yang Terbangun	46
Tabel 12.1.4	Perhitungan Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	46
Tabel 12.1.5	Perhitungan Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	47
Tabel 12.1.6	Perhitungan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	47
Tabel 12.1.7	Perhitungan Persentase Peningkatan SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat	48
Tabel 12.1.8	Perhitungan Persentase Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang Tersusun	48
Tabel 12.2	Data Statistik Sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Indikator LPPD	49
Tabel 12.2.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	49
Tabel 12.3.1	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak per Kecamatan	50
Tabel. 12.3.2	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik per Kecamatan	51

Tabel. 12.3.3	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Akses Air Minum Layak	52
Tabel 13.1	Data Statistik Sektor Dinas Kesehatan Menurut Indikator RPJMD	54
Tabel 13.1.1	Perhitungan Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	55
Tabel 13.1.2	Perhitungan Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	56
Tabel 13.1.3	Perhitungan Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Puskesmas	56
Tabel 13.1.4	Data Angka Kematian Ibu per Kecamatan	57
Tabel 13.1.5	Data Angka Kematian Bayi per Kecamatan	58
Tabel 13.1.6	Data Pravelensi Balita Stunting per Kecamatan	59
Tabel 13.2	Data Statistik Sektor Dinas Kesehatan Menurut Indikator SPM dan LPPD	60
Tabel 13.2.1	Persentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar per Kecamatan	62
Tabel 13.2.2	Persentase Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar per Kecamatan	63
Tabel 13.2.3	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan	64
Tabel 13.2.4	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar per Kecamatan	65
Tabel 13.2.5	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan ...	66
Tabel 13.2.6	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan	67
Tabel 13.2.7	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan	68
Tabel 13.2.8	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan	69
Tabel 13.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar per Kecamatan	70
Tabel 13.2.10	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir per Kecamatan	71

Tabel 13.2.11	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan per Kecamatan	72
Tabel 13.2.12	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil per Kecamatan	73
Tabel 13.3	Data Statistik Sektoral Dinas Kesehatan Menurut Indikator SDGs	74
Tabel 13.3.1	Perhitungan Kejadian Malaria per 1.000	75
Tabel 13.3.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta per Kecamatan	76
Tabel 13.3.3	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan) per Kecamatan	77
Tabel 13.3.4	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan) per Kecamatan	78
Tabel 13.3.5	Data Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup per Kecamatan	79
Tabel 13.3.6	Data Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup per Kecamatan	80
Tabel 13.3.7	Perhitungan Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	81
Tabel 13.3.8	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB per Kecamatan	82
Tabel 13.3.9	Prevalensi Tenakan Darah Tinggi per Kecamatan	83
Tabel 13.3.10	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	84
Tabel 13.3.11	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI eksklusif per Kecamatan	85
Tabel 13.4.1	Data Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Suspek Campak yang dapat dicegah dengan Imunisasi Menurut Kecamatan	86
Tabel 13.4.2	Data Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan	89
Tabel 13.4.3	Data Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan	90
Tabel 13.4.4	Data Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) Menurut Kecamatan	91
Tabel 13.4.5	Data Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditangani kurang dari 24 Jam Menurut Kecamatan	92
Tabel 13.4.6	Data Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan	93

Tabel 13.4.7	Data Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Berisiko Usia >15 tahun secara Kumulasi Menurut Kecamatan	96
Tabel 13.4.8	Data Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan	97
Tabel 13.4.9	Data Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Menurut Kecamatan	98
Tabel 13.4.10	Data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan	99
Tabel 13.4.11.1	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2020	100
Tabel 13.4.11.2	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021	101
Tabel 13.4.11.3	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2022	102
Tabel 13.4.11.4	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2023	103
Tabel 13.4.12.1	Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..	104
Tabel 13.4.12.2	Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..	105
Tabel 13.4.12.3	Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan Tahun 2022 ..	106
Tabel 13.4.12.1	Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..	107
Tabel 13.4.13	Data Jumlah Porsyandu Menurut Kecamatan	108
Tabel 13.4.14	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Menurut Kecamatan	109
Tabel 13.4.15	Data Jumlah Puskesmas berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat inap Menurut Kecamatan .	110
Tabel 13.4.16.1	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2020	111
Tabel 13.4.16.2	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2021	112
Tabel 13.4.16.3	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2022	113
Tabel 13.4.16.4	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2023	114
Tabel 13.4.17.1	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan Tahun 2020	115

Tabel 13.4.17.2	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan Tahun 2021	116
Tabel 13.4.17.3	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan Tahun 2022	117
Tabel 13.4.17.4	Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan Tahun 2023	118
Tabel 13.4.18	Data Jumlah Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan	119
Tabel 13.4.19.1	Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan Tahun 2020	120
Tabel 13.4.19.2	Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan Tahun 2021	121
Tabel 13.4.19.3	Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan Tahun 2022	122
Tabel 13.4.19.4	Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan Tahun 2023	123
Tabel 14.1	Data Statistik Sektor Dinas Sosial Menurut Indikator LPPD	124
Tabel 14.2	Data Statistik Sektor Dinas Sosial Menurut Indikator RPJMD	125
Tabel 14.3	Data Statistik Sektor Dinas Sosial Menurut Indikator SDGs	126
Tabel 14.4.1	Data Statistik Sektor Dinas Sosial Menurut Indikator SPM	127
Tabel 14.4.2.1	Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2020	128
Tabel 14.4.2.2	Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2021	129
Tabel 14.4.2.3	Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2022	130
Tabel 14.4.2.4	Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2023	131
Tabel 14.4.3	Data Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	132
Tabel 14.4.4	Data Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	133
Tabel 14.4.5	Data Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	134

Tabel 14.4.6	Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	135
Tabel 14.4.7	Data Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana	136
Tabel 14.4.8	Data Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis Bencana	136
Tabel 14.4.9.1	Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2020	137
Tabel 14.4.9.2	Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2021	138
Tabel 14.4.9.3	Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2022	139
Tabel 14.4.9.4	Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2023	140
Tabel 14.4.10	Data Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	141
Tabel 14.4.11	Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin	142
Tabel 14.4.12	Data Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	143
Tabel 14.4.13	Data Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	144
Tabel 14.4.14	Data Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	145
Tabel 14.5.1	Data Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	146
Tabel 15.1	Data Statistik Sektor Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Indikator RPJMD	148
Tabel 15.2	Data Statistik Sektor Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Indikator LPPD	149
Tabel 16.1	Data Statistik Sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Indikator RPJMD	151
Tabel 16.2	Data Statistik Sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Indikator LPPD	152
Tabel 16.3.1	Data Statistik Sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Indikator SPM	153
Tabel 16.3.2	Data Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan	154

Tabel 16.3.3	Data Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Negeri/Swasta	156
Tabel 16.3.4	Data Jumlah Guru PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin	156
Tabel 16.3.5	Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama	157
Tabel 16.3.6	Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Negeri/Swasta	158
Tabel 16.3.7	Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin	158
Tabel 16.3.8	Data Jumlah Siswa Paud, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan	159
Tabel 16.3.9	Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan	161
Tabel 16.3.10	Data Jumlah Guru Paud, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan	162
Tabel 16.3.11	Data Jumlah Guru PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	164
Tabel 17.1	Data Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Indikator LPPD	166
Tabel 17.2	Data Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Indikator RPJMD	167
Tabel 18.1	Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Menurut Indikator RPJMD	169
Tabel 18.1.1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan per Kecamatan	170
Tabel 18.2	Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Menurut Indikator SDGs	171
Tabel 18.2.1	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme AKAN Berdasarkan Jenis Kelamin	171
Tabel 18.2.2	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	172
Tabel 18.3	Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Menurut Indikator LPPD	172
Tabel 19.1	Data Statistik Sektor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut Indikator RPJMD	174
Tabel 20.1	Data Statistik Sektor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Menurut Indikator LPPD	176
Tabel 20.1.1	Perhitungan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	176

Tabel 20.1.2	Perhitungan Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	177
Tabel 20.1.3	Perhitungan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	177
Tabel 20.2	Data Statistik Sektor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Menurut Indikator RPJMD	178
Tabel 20.2.1	Perhitungan Persentase Penetapan Kebutuhan ASN	178
Tabel 20.2.2	Perhitungan Persentase Kedisiplinan ASN	179
Tabel 20.2.3	Perhitungan Persentase Penilaian Kinerja ASN	179
Tabel 20.2.4	Perhitungan Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	180
Tabel 21.1	Data Statistik Sektor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Menurut Indikator RPJMD	182
Tabel 22.1	Data Statistik Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Indikator LPPD dan SPM	184
Tabel 22.1.1	Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana per Kecamatan	185
Tabel 22.1.2	Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana per Kecamatan	186
Tabel 22.2	Data Statistik Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Indikator RPJMD	187
Tabel 22.2.1	Data Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk per Kecamatan	188
Tabel 23.1	Data Statistik Sektor Badan Pendapatan Daerah Menurut Indikator RPJMD	189
Tabel 23.2	Data Statistik Sektor Badan Pendapatan Daerah Menurut Indikator LPPD	190
Tabel 23.2.1	Perhitungan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	190
Tabel 24.1	Data Statistik Sektor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menurut Indikator RPJMD	191
Tabel 24.2	Data Statistik Sektor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menurut Indikator LPPD	192
Tabel 25.1	Data Statistik Sektor Inspektorat Menurut Indikator RPJMD	194
Tabel 25.1.1	Perhitungan Persentase OPD yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)	195

Tabel 26.1	Data Statistik Sektor al Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Menurut Indikator SPM	197
Tabel 26.2	Data Statistik Sektor al Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Menurut Indikator LPPD	197
Tabel 26.2.1	Perhitungan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	198
Tabel 26.3	Data Statistik Sektor al Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Menurut Indikator RPJMD	199
Tabel 27.1	Data Statistik Sektor al Sekretariat DPRD Menurut Indikator RPJMD	201
Tabel 28.1	Data Statistik Sektor al Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Menurut Indikator RPJMD	202
Tabel 29.1	Data Statistik Sektor al Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Menurut Indikator RPJMD	203
Tabel 30.1	Data Statistik Sektor al Bagian Perekonomian dan SDA Menurut Indikator RPJMD	204
Tabel 30.2	Data Statistik Sektor al Bagian Organisasi Menurut Indikator RPJMD	205
Tabel 30.3	Data Statistik Sektor al Bagian Hukum Menurut Indikator RPJMD	205
Tabel 30.4	Data Statistik Sektor al Bagian Kesra Menurut Indikator RPJMD	206
Tabel 30.5	Data Statistik Sektor al Bagian Administrasi Pembangunan Menurut Indikator RPJMD	206
Tabel 30.6	Data Statistik Sektor al Bagian Administrasi Pemerintahan Menurut Indikator RPJMD	206
Tabel 30.7	Data Statistik Sektor al Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Menurut Indikator RPJMD	207
Tabel 30.8	Data Statistik Sektor al Bagian Umum Menurut Indikator RPJMD	207
Tabel 30.9.1	Data Statistik Sektor al Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Indikator RPJMD	208
Tabel 30.9.2	Data Statistik Sektor al Bagian Reformasi Birokrasi Tematik	208
Tabel 31.1	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan Berdasarkan Kecamatan	210
Tabel 31.2	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan	211
Tabel 31.3	Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Kecamatan	212

Tabel 31.4	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Kecamatan	213
Tabel 31.5	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Kecamatan	214
Tabel 32.1	Data Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik Menurut Indikator Data Makro Pembangunan	216
Tabel 32.2	Data Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik Menurut Indikator SDGs	217
Tabel 32.3	Data Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik Menurut Indikator RPJMD	218

1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 89 Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana dan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 18 data indikator yang terdiri dari 7 data indikator SDGs, 9 data indikator RPJMD, 1 data Indikator LPPD dan 1 data indikator Renstra. Secara lengkap 18 data indikator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 1.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Indikator SDGs**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Penurunan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	%	32,48	34,01	34,34	35,69	27,46	26,78
2.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	-	-	37,86	37,89	38,15	38,22
3.	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
4.	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	%	77,19	76,29	77,11	77,74	70,33	76,12
5.	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15 - 49 Tahun yang Berstatus Kawin (Kelompok Penduduk 40% terbawah)	%	77,19	76,26	77,11	77,74	71,27	77,13
6.	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1000	2,23	2,17	2,31	2,05	2,03	1,99
7.	Angka Kelahiran pada Perempuan umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Per 1000	36,76	11,07	9,93	10,05	17,7	12
8.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang Tidak Terpenuhi)	%	9,93	9,94	8,63	8,06	19,74	7

Sumber data : Indikator SDGs Dinas PPKBPPPA

Tabel. 1.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator LPPD Dinas PPKBPPPA

Tabel. 1.3

**Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Indikator Renstra**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Keluarga Sejahtera	%	83,31	83,32	84,20	84,79	85,47

Sumber data : Indikator Renstra Dinas PPKBPPPA

Data Persentase Keluarga Sejahtera dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 1.3.1 berikut:

Tabel. 1.3.1
Data Persentase Keluarga Sejahtera per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Keluarga Sejahtera per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	96,93	96,93	97,34	97,44	97,63
2.	Geger	3519020	%	96,61	96,63	96,95	96,99	96,99
3.	Dolopo	3519030	%	95,51	95,51	95,81	96,14	96,37
4.	Dagangan	3519040	%	94,42	94,41	95,35	95,54	95,72
5.	Wungu	3519050	%	87,41	87,43	88,37	88,75	89,18
6.	Kare	3519060	%	72,02	72,02	73,05	74,71	75,16
7.	Gemarang	3519070	%	58,44	58,46	59,10	61,11	62,61
8.	Saradan	3519080	%	66,35	66,36	67,11	67,92	70,21
9.	Pilangkenceng	3519090	%	47,91	47,93	50,20	51,52	53,10
10.	Mejayan	3519100	%	87,77	87,78	88,42	88,86	89,33
11.	Wonoasri	3519110	%	88,01	88,00	89,04	89,19	89,41
12.	Balerejo	3519120	%	72,77	72,77	75,25	76,49	77,26
13.	Madiun	3519130	%	91,03	91,03	92,26	92,61	93,08
14.	Sawahan	3519140	%	96,98	96,98	97,45	97,72	97,81
15.	Jiwan	3519150	%	95,09	95,11	95,60	95,19	95,43

Sumber data : Indikator Renstra Dinas PPKBPPPA

Tabel. 1.4

**Data Statistik Sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	%	9,93	9,84	8,63	8,06	19,74	7,30
2.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	%	-	-	79,52	79,52	90,34	100
3.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Aktif	%	-	-	30	30	40	50
4.	Persentase Dokumen Data Informasi Kependudukan yang Tersusun	%	-	-	100	100	100	100
5.	Persentase Perkawinan dengan Usia Istri dibawah 20 tahun	%	6,47	7,1	7,1	6,29	5,45	5,46
6.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	-	-	11,12	7,89	16,05	13,75
7.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	-	-	0	1,12	3,004	1,57
8.	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	%	-	-	-	58,93	72,00	72,68
9.	Indeks Pembangunan Gender	-	91,13	91,81	91,79	91,77	92,14	92,31

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas PPKBPPPA

2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 75 Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
- e. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu 9 data indikator yang terdiri dari 5 data indikator RPJMD dan 4 data Indikator LPPD. Secara lengkap 9 data indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terinci pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 2.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	95,51	94,37	99,56
2.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	%	66,39	65,88	67,52
3.	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran	%	97,47	97,88	97,92
4.	Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	26,67	30,00	30,00

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Persentase Perekaman KTP Elektronik, Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA dan Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3 berikut:

Tabel. 2.1.1

Data Persentase Perekaman KTP Elektronik per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Perekaman KTP Elektronik per Kecamatan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	94,31	93,73	99,58
2.	Geger	3519020	%	95,79	94,62	99,71
3.	Dolopo	3519030	%	93,77	92,87	99,49
4.	Dagangan	3519040	%	94,04	93,16	99,43
5.	Wungu	3519050	%	94,57	93,39	99,47
6.	Kare	3519060	%	95,90	95,02	99,51
7.	Gemarang	3519070	%	92,16	91,47	99,47
8.	Saradan	3519080	%	93,86	92,95	99,56
9.	Pilangkenceng	3519090	%	97,05	95,78	99,63
10.	Mejayan	3519100	%	96,54	95,04	99,56
11.	Wonoasri	3519110	%	97,17	95,68	99,58
12.	Balerejo	3519120	%	97,59	96,40	99,76
13.	Madiun	3519130	%	97,84	96,26	99,71
14.	Sawahan	3519140	%	97,95	96,28	99,64
15.	Jiwan	3519150	%	96,82	95,27	99,42

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel. 2.1.2

Data Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA per Kecamatan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	59,05	59,42	61,48
2.	Geger	3519020	%	66,15	65,00	67,15
3.	Dolopo	3519030	%	72,26	72,59	73,85
4.	Dagangan	3519040	%	58,78	61,58	63,57
5.	Wungu	3519050	%	68,86	67,44	69,20
6.	Kare	3519060	%	57,62	58,38	60,05
7.	Gemarang	3519070	%	54,78	56,55	57,99
8.	Saradan	3519080	%	74,66	69,46	69,93
9.	Pilangkenceng	3519090	%	70,52	70,49	70,96
10.	Mejayan	3519100	%	68,03	67,68	68,98
11.	Wonoasri	3519110	%	60,99	63,04	65,18
12.	Balerejo	3519120	%	59,03	62,21	64,82
13.	Madiun	3519130	%	67,78	65,38	68,20
14.	Sawahan	3519140	%	59,85	64,72	66,72
15.	Jiwan	3519150	%	79,77	74,02	75,63

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel. 2.1.3

Data Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran per Kecamatan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	97,96	98,10	98,02
2.	Geger	3519020	%	98,07	98,22	98,27
3.	Dolopo	3519030	%	96,75	97,56	97,43
4.	Dagangan	3519040	%	97,28	97,72	97,83
5.	Wungu	3519050	%	97,40	98,12	98,17
6.	Kare	3519060	%	97,99	98,06	98,28
7.	Gemarang	3519070	%	93,12	95,06	95,39
8.	Saradan	3519080	%	95,91	96,79	97,14
9.	Pilangkenceng	3519090	%	97,89	98,01	97,95
10.	Mejayan	3519100	%	97,17	97,57	97,21
11.	Wonoasri	3519110	%	98,63	98,52	98,59
12.	Balerejo	3519120	%	98,86	98,71	98,91
13.	Madiun	3519130	%	99,18	99,09	99,05
14.	Sawahan	3519140	%	99,00	98,89	98,81
15.	Jiwan	3519150	%	97,68	98,29	98,32

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel. 2.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Database Kependudukan yang Valid	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam Satu Tahun	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Penduduk yang Sudah Menerima Dokumen Kependudukan	%	100	100	100	99,92	99,76	100
4.	Persentase Penduduk yang Sudah Memiliki Dokumen Kependudukan	%	96,83	96,64	94,55	95,40	96,95	93,65
5.	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	%	59,09	81,58	87,63	93,60	87,91	92,96

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Persentase Penduduk yang Sudah Menerima Dokumen Kependudukan, Data Persentase Penduduk yang Sudah Memiliki Dokumen Kependudukan dan Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 2.2.1, 2.2.2 dan 2.2.3 berikut:

Tabel. 2.2.1

Data Persentase Penduduk yang Sudah Menerima Dokumen Kependudukan per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Penduduk yang Sudah Menerima Dokumen Kependudukan per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100	99,95	99,82	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100	99,83	99,84	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100	99,95	99,67	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100	99,95	99,81	100
5.	Wungu	3519050	%	100	100	100	99,99	99,73	100
6.	Kare	3519060	%	100	100	100	99,95	99,81	100
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100	99,49	99,64	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100	99,97	99,9	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100	99,95	99,83	100
10.	Mejayan	3519100	%	100	100	100	99,96	99,58	100
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100	99,95	99,82	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100	99,97	99,82	100
13.	Madiun	3519130	%	100	100	100	99,99	99,84	100
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100	99,88	99,74	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100	99,85	99,6	100

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel. 2.2.2

Data Persentase Penduduk yang Sudah Memiliki Dokumen Kependudukan per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Penduduk yang Sudah Memiliki Dokumen Kependudukan per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	96,66	96,23	93,89	94,65	96,1	92,61
2.	Geger	3519020	%	97,04	96,88	94,9	95,69	97,13	93,50
3.	Dolopo	3519030	%	96,3	96,15	92,69	93,96	95,75	94,79
4.	Dagangan	3519040	%	96,87	96,21	93,14	94,25	95,93	92,78
5.	Wungu	3519050	%	96,67	96,48	93,58	94,47	96,33	93,86
6.	Kare	3519060	%	97,51	97,13	95,4	96,25	97,23	92,48
7.	Gemarang	3519070	%	96,33	95,76	90,98	92,15	94,72	92,52
8.	Saradan	3519080	%	96,32	95,79	92,85	93,77	95,82	93,88
9.	Pilangkenceng	3519090	%	97,21	97,27	95,93	96,66	98,01	94,27
10.	Mejayan	3519100	%	97,19	96,98	95,21	96,11	97,66	94,07
11.	Wonoasri	3519110	%	97,81	97,73	96,82	97,17	98,09	93,46
12.	Balerejo	3519120	%	96,88	97,16	96,54	97,22	98,37	93,57
13.	Madiun	3519130	%	96,85	97,17	96,54	97,3	98,54	93,82
14.	Sawahan	3519140	%	96,86	96,97	96,98	97,62	98,61	93,57
15.	Jiwan	3519150	%	96,57	96,65	95,61	96,37	97,85	94,56

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel. 2.2.3

**Data Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil
per Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	53,69	77,34	84,27	89,88	85,55	91,38
2.	Geger	3519020	%	72,52	85,97	92,05	97,42	92,31	96,9
3.	Dolopo	3519030	%	73,11	74,22	80,19	86,61	82,39	89,9
4.	Dagangan	3519040	%	56,45	78,98	85,14	90,76	85,92	91,98
5.	Wungu	3519050	%	57,53	80,25	89,45	96,87	89,21	93,83
6.	Kare	3519060	%	55,3	81,45	86,55	91,52	86,45	91,23
7.	Gemarang	3519070	%	54,12	64,4	69,56	73,86	71,25	77,46
8.	Saradan	3519080	%	52,4	75,71	81,6	87,48	82,71	88,66
9.	Pilangkenceng	3519090	%	50,17	80,36	84,54	90,15	84,68	89,96
10.	Mejayan	3519100	%	61,31	81,54	85,96	90,81	86,98	91,22
11.	Wonoasri	3519110	%	58,94	94,46	99,87	105,13	97,83	102,71
12.	Balerejo	3519120	%	62,05	87	94,06	99,7	94,21	97,51
13.	Madiun	3519130	%	59,77	94,27	99,76	108,01	97,27	100,13
14.	Sawahan	3519140	%	59,51	92,15	100,25	106,81	97,96	101,4
15.	Jiwan	3519150	%	56,21	85,46	91,52	98,94	91,47	95,34

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan bidang pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan bidang pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan bidang pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan bidang pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 11 data indikator yang terdiri dari 1 data indikator LPPD, 8 data indikator RPJMD dan 2 data indikator SDGs. Secara lengkap 11 data indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 3.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	100	0	75	78,95	56,82	113,64

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel. 3.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Desa Mandiri	%	0,51	0,51	2,02	9,6	22,22	47,47
2.	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	%	0	0	0	100	100	100
3.	Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk	Kerja Sama	0	0	14	14	17	14
4.	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	%	36,87	49,49	53,03	62,63	74,24	84,85
5.	Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Baik	%	22,7	48,9	62,1	70,7	88,4	100
6.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	%	32,49	41,54	54,01	56,8	63,4	69,7
7.	Persentase BUMDes yang Aktif	%	7,58	15,15	24,24	33,33	46,46	51,5
8.	Persentase Lembaga Ekonomi yang Aktif	%	17,8	40	43,8	56,7	66,8	73,7

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel. 3.3

**Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurut Indikator SDGs**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	4	19	44	94

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Data Jumlah Desa Mandiri dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 3.3.1 berikut:

Tabel. 3.3.1

Data Jumlah Desa Mandiri per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Desa Mandiri per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Desa	0	0	1	2	3	10
2.	Geger	3519020	Desa	0	0	0	1	1	7
3.	Dolopo	3519030	Desa	0	0	0	0	1	2
4.	Dagangan	3519040	Desa	0	0	0	1	1	9
5.	Wungu	3519050	Desa	0	0	0	4	10	12
6.	Kare	3519060	Desa	0	0	1	4	5	8
7.	Gemarang	3519070	Desa	0	0	0	0	2	3
8.	Saradan	3519080	Desa	0	0	0	0	0	4
9.	Pilangkenceng	3519090	Desa	0	0	0	0	1	4
10.	Mejayan	3519100	Desa	0	0	0	1	3	5
11.	Wonoasri	3519110	Desa	0	0	0	0	0	4
12.	Balerejo	3519120	Desa	0	0	0	2	6	8
13.	Madiun	3519130	Desa	0	0	0	1	3	6
14.	Sawahan	3519140	Desa	0	0	1	2	7	10
15.	Jiwan	3519150	Desa	1	1	1	1	1	2
Total				1	1	4	19	44	94

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan mall pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengampu 6 data indikator yang terdiri dari 1 data indikator LPPD dan 5 data indikator RPJMD. Secara lengkap 6 data indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 4.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peningkatan Investasi	%	40,84	25,44	63,39	14,38

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Data Persentase Peningkatan Investasi diperoleh dari perbandingan antara realisasi investasi tahun n-1 dengan realisasi tahun n dengan rincian tersaji pada tabel 4.1.1 berikut:

Tabel. 4.1.1

Perhitungan Persentase Peningkatan Investasi

No.	Tahun	Realisasi Investasi Tahun n-1	Realisasi Investasi tahun n	Persentase Peningkatan Investasi (%)
1.	2020	Rp. 631.542.911.887	Rp. 889.484.081.181	40,84
2.	2021	Rp. 889.484.081.181	Rp. 1.115.771.596.934	25,44
3.	2022	Rp. 1.115.771.596.934	Rp. 1.823.088.069.145	63,39
4.	2023	Rp. 1.823.088.069.145	Rp. 1.825.708.828.487	14,38

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel. 4.2

**Data Statistik Sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Minat Investasi	Rupiah	416.858.337.000	644.879.310.587	1.290.400.446.098	1.987.038.922.320	4.002.949.087.544	7.360.642.621.720
2.	Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	Hari	10	10	10	14	14	12
3.	Persentase Perusahaan yang Tertib Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	0	27,06	25,47	56,08	78,13	72
4.	Persentase Investor yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	%	0	0	0	100	100	100
5.	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	0	0	0	8,57	24,29	99,34

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 84 Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengampu 15 data indikator yang terdiri dari 7 data indikator LPPD, 7 data indikator RPJMD dan 1 data indikator SDGs. Secara lengkap 15 data indikator Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 5.1

**Data Statistik Sektor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,2	2,06	0,64
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	0,73	2,46	0,82
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	14	39	29
4.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangaan	%	-	0	0
5.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	%	-	270,66	-6,2
6.	Tingkat Hunian Akomodasi	%	23,86	22,93	23,97
7.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,01	1,0047	1,4239

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel. 5.2

**Data Statistik Sektor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Menurut Indikator SDGs**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	369.151	545.436	130.024	119.738	481.941	452.056

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel. 5.3

**Data Statistik Sektor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan)	Rupiah	-	-	-	442.753.297.140,00	458.466.303.690,00	505.233.967.844,95
2.	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	0	5,5	0	2,8	7,7	7,1
3.	Persentase Pemuda yang Berprestasi	%	0,05	0,06	0,02	0,02	0,05	0,06
4.	Persentase Pengembangan Daya Tarik Pariwisata yang Dilaksanakan	%	16,9	10,2	27,1	10,2	77,6	13,6
5.	Persentase Peningkatan Promosi Pariwisata yang Dilaksanakan	%	0	0	0	36,36	186,36	213,64
6.	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	%	-	-	-	-	0	23,74
7.	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	-	-	-	0	853,3

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

6. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 tahun 2021, Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perikanan mengampu 9 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD dan 7 data indikator RPJMD. Secara lengkap 9 data indikator Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 6.1
Data Statistik Sektoral Dinas Pertanian dan Perikanan
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan Hasil Tangkap	Ton	509,20	509,40	509.60
	Jumlah Total Produksi Perikanan Hasil Budidaya	Ton	3.611,57	3.649,10	3.705,15
2.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Ton/Ha	6,848	6,854	6,992

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pertanian dan Perikanan

Data Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun diperoleh dari perbandingan antara jumlah produksi tanaman pangan dengan luas panen dengan rincian tersaji pada tabel 6.1.1 berikut:

Tabel. 6.1.1

Perhitungan Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

No.	Tahun	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
1.	2021	664.497,31	97.038	6,848
2.	2022	711.682,64	103.839	6,854
3.	2023	700.582,42	100.203	6,992

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel. 6.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Pertanian dan Perikanan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Sarana Pertanian	%	3,62	7,24	8,51
2.	Persentase Lahan Pertanian yang Bebas Dari Bencana Pertanian	%	100	87,4	99,9
3.	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	%	-	30,6	3,97
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	%	4,5	4	21,24
5.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	17,94	7,67	8,84
6.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,92	1,04	154
7.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,37	0,04	0,04

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pertanian dan Perikanan

7. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pangan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengampu 9 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD dan 7 data indikator RPJMD. Secara lengkap 9 data indikator Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 7.1

Data Statistik Sektoral Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-	-	-	-	3,6057	6,5762
2.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	-	-	-	-	2173,8	2316,2

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tabel. 7.2

**Data Statistik Sektor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Daerah Berpotensi Rawan Pangan yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Kasus Kesehatan Hewan yang Tertangani	%	-	-	-	100	100	100
3.	Persentase Pangan Seger Asal Tanaman (PSAT) yang Aman	%	-	-	-	100	100	100
4.	Persentase Ternak Bunting dari Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	%	-	-	81,76	83	51,78	70
5.	Persentase Terpeliharanya Prasarana Peternakan	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Peningkatan Kualitas Peternak dan Pelaku Usaha Ternak	%	-	-	38,83	58,25	77,67	116,5
7.	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan Protein	%	-	52,8	-	53,1	56,1	59,1

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 88 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup mengampu 14 data indikator yang terdiri dari 1 data indikator LPPD, 11 data indikator RPJMD dan 2 data indikator SDGs. Secara lengkap 14 data indikator Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 8.1
Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	0	0	0	18	50

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Lingkungan Hidup

Tabel. 8.2
Data Statistik Sektor Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	77,91	75,98	76,29	66,69	70,45	70,52
2.	Persentase Layanan Pelaku Usaha dan Kegiatan yang Menerapkan Dokumen Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Cangkupan Penghijauan Wilayah Potensi Longsor dan Sumber Mata Air	%	7	7	7	7	7	7
4.	Persentase Industri yang Menerapkan Sistem Pengolahan Limbah B3	%	-	-	100	100	100	100
5.	Persentase Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	%	-	-	-	40	45	45
7.	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Sampah yang Tertangani	%	36,44	40	40	40	45	50
9.	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Dokumen	-	-	-	5	5	7
10.	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Hektar	-	-	-	22,1	22,1	22,1
11.	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Sekolah	12	5	2	9	19	5

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup

Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh dari perhitungan antara Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dengan rincian tersaji pada tabel 8.2.1 berikut:

Tabel. 8.2.1
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1.	2018	56,96	82,39	90,26	77,91
2.	2019	48,71	84,07	90,38	75,98
3.	2020	50	84,66	90,38	76,29
4.	2021	50	84,99	61,49	66,69
5.	2022	60,67	84,61	61,09	70,45
6.	2023	61,92	82,92	62,34	70,52

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup

Tabel. 8.3
Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Indikator SDGs

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air	-	56,96	48,71	50	50	60,67	61,92
2.	Indeks Tutupan Hutan	-	92,26	90,38	90,38	61,49	61,09	62,34

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Lingkungan Hidup

9. DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2019, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan mengampu 6 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD dan 4 data indikator RPJMD. Secara lengkap 6 data indikator Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 9.1
Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rasio konektivitas	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Tabel. 9.2
Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	%	40	55	65	80	90	90
2.	Persentase angka tertib lalu lintas	%	67	80	83	86	89	90
3.	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	%	-	-	-	75	85	95
4.	Persentase kendaraan laik jalan	%	90	90	90	90	90	90

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perhubungan

10. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi:

- Perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengampu 5 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD dan 3 data indikator RPJMD. Secara lengkap 5 data indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 10.1
Data Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	61,2	70,5	58,1
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	18,16	18,71	48,80

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel. 10.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	%	0	1,14	0	1,62	2,16	2,14
2.	Indeks Ketersediaan Arsip	-	-	-	75,020	75,005	75,005	50,57
3.	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	-	-	-	0,5	0,67	0,67	0,83

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Data Persentase Perpustakaan Terakreditasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah perpustakaan yang terakreditasi dengan jumlah keseluruhan perpustakaan dengan rincian tersaji pada tabel 10.2.1 berikut:

Tabel. 10.2.1

Perhitungan Persentase Perpustakaan Terakreditasi

No.	Tahun	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Keseluruhan	Persentase Perpustakaan Terakreditasi
1.	2018	0	616	0
2.	2019	7	616	1,14
3.	2020	0	616	0
4.	2021	10	616	1,62
5.	2022	15	694	2,16
6.	2023	15	701	2,14

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

11. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 11 Tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu 23 data indikator yang terdiri dari 3 data indikator LPPD, 13 data indikator RPJMD, 2 data indikator SPM dan 5 data indikator Data Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur. Secara lengkap 23 data indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 11.1

Data Statistik Sektor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66,65	0	0
2.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	100	100
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0	0	27,74

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.2

**Data Statistik Sektor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0,62	1,29	0,80
2.	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun bagi Korban Bencana	%	30	100	100
3.	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	0	0	0
4.	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	%	0	17,00	0,86
5.	Persentase kawasan kumuh baru yang tertangani	%	0	17,00	0,86
6.	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	%	0	0	0
7.	Persentase Orang/Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil	%	100	100	100
8.	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terselesaikan	m2	3.220	0	2.469
9.	Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	Dokumen	0	0	0
10.	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	%	66,67	0	0
11.	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	Dokumen	0	0	16
12.	Jumlah Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Teredistribusi	m ²	0	0	0
13.	Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	m ²	0	0	0

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Data Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertanggani dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 11.2.1 berikut:

Tabel. 11.2.1

Data Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertanggani per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertanggani per Kecamatan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	0,25	0,12	0,43
2.	Geger	3519020	%	0,37	0,43	0,35
3.	Dolopo	3519030	%	0,1	0,05	0,35
4.	Dagangan	3519040	%	0,86	0,3	0,63
5.	Wungu	3519050	%	0,32	0,4	0,72
6.	Kare	3519060	%	0,17	3,7	0,89
7.	Gemarang	3519070	%	1,08	2,81	0,93
8.	Saradan	3519080	%	0,61	1,85	0,07
9.	Pilangkenceng	3519090	%	1,25	4,59	1,40
10.	Mejayan	3519100	%	0,26	0,91	0,79
11.	Wonoasri	3519110	%	0,36	0,99	0,74
12.	Balerejo	3519120	%	0,57	0,63	1,19
13.	Madiun	3519130	%	1,34	1,12	1,45
14.	Sawahan	3519140	%	1,54	2,5	1,63
15.	Jiwan	3519150	%	0,87	0,68	1,44

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.3

**Data Statistik Sektor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menurut Indikator SPM**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	0	0	591
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	0	0	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.4.1

Data Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota per Kecamatan					
				Direhabilitasi		Dibangun Kembali		Dibangun Baru atau Relokasi	
				Tahun 2023		Tahun 2023		Tahun 2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Rumah	0	0	0	1	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah	0	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah	0	0	0	0	0	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah	2	20	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah	1	0	0	3	0	0
6.	Kare	3519060	Rumah	5	1	0	1	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah	0	0	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah	10	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah	10	13	1	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah	45	40	0	0	0	0
11.	Wonoasri	3519110	Rumah	390	2	4	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah	9	3	0	2	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah	9	1	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah	0	5	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah	1	11	0	1	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.4.2

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kecamatan			
				Tahun			
				2022		2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Ha	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Ha	34,38	34,38	18,86	18,86
3.	Dolopo	3519030	Ha	15,11	15,11	1,56	1,56
4.	Dagangan	3519040	Ha	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Ha	24,13	24,13	18,86	18,86
6.	Kare	3519060	Ha	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Ha	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Ha	47,90	47,90	47,90	47,90
9.	Pilangkenceng	3519090	Ha	16,59	16,59	16,59	16,59
10.	Mejayan	3519100	Ha	54,68	54,67	54,67	54,67
11.	Wonoasri	3519110	Ha	32,63	32,63	17,9	17,9
12.	Balerejo	3519120	Ha	20,74	20,74	17,37	17,37
13.	Madiun	3519130	Ha	35,97	35,97	32,44	32,44
14.	Sawahan	3519140	Ha	6,96	6,96	6,25	6,25
15.	Jiwan	3519150	Ha	31,02	31,02	22,73	22,73

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.4.3

Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam per Kecamatan			
				Tahun			
				2022		2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Rumah	-	0	0	1
2.	Geger	3519020	Rumah	-	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah	-	1	0	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah	-	82	2	20
5.	Wungu	3519050	Rumah	-	1	1	3
6.	Kare	3519060	Rumah	-	0	5	2
7.	Gemarang	3519070	Rumah	-	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah	-	6	10	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah	-	166	11	13
10.	Mejayan	3519100	Rumah	-	38	45	40
11.	Wonoasri	3519110	Rumah	-	0	394	2
12.	Balerejo	3519120	Rumah	-	0	9	5
13.	Madiun	3519130	Rumah	-	1	9	1
14.	Sawahan	3519140	Rumah	-	42	0	5
15.	Jiwan	3519150	Rumah	-	1	1	12

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 11.4.4

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) per Kecamatan			
				Tahun			
				2022		2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Rumah	648	648	624	624
2.	Geger	3519020	Rumah	407	407	313	313
3.	Dolopo	3519030	Rumah	279	279	268	268
4.	Dagangan	3519040	Rumah	659	659	606	606
5.	Wungu	3519050	Rumah	715	715	639	639
6.	Kare	3519060	Rumah	1.022	1.022	579	579
7.	Gemarang	3519070	Rumah	803	803	491	491
8.	Saradan	3519080	Rumah	1.881	1.881	1.452	1.452
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah	3.962	3.962	3.060	3.060
10.	Mejayan	3519100	Rumah	722	722	584	584
11.	Wonoasri	3519110	Rumah	595	595	472	472
12.	Balerejo	3519120	Rumah	1.450	1.450	1.349	1.349
13.	Madiun	3519130	Rumah	855	885	740	740
14.	Sawahan	3519140	Rumah	738	738	510	510
15.	Jiwan	3519150	Rumah	1.003	1.003	866	866

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 72 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengampu 18 data indikator yang terdiri dari 3 data indikator LPPD, 12 data indikator RPJMD dan 3 data Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur. Secara lengkap 18 data indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 12.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	%	-	-	-	84,98	85,25	85,95
2.	Persentase Perluasan Akses Pelayanan Air Bersih (SR)	%	-	-	-	2,26	3,19	3,52
3.	Persentase Sarana Limbah Domestik Setempat yang Terbangun	%	-	-	-	6,98	14,53	18,89
4.	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	3,16	3,52	3,99	4,48	4,79	5,11
5.	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	0,69	1,08	2,45	4,22	5,75	7,14
6.	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah yang Terpenuhi	%	-	-	-	83,05	88,14	100
7.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	-	-	-	74,13	76,89	71,9
8.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	-	-	-	85,71	86,16	86,6
9.	Persentase Peningkatan Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat	%	-	-	-	52,05	60,77	85,13
10.	Persentase Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Yang Tersusun	%	-	-	-	60	100	100
11.	Persentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik	%	-	-	-	-	84,66	-
12.	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Ditata	%	-	-	-	60	88,89	-

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi diperoleh dari perbandingan antara luas daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani dengan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.1 berikut:

Tabel. 12.1.1

Perhitungan Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi

No.	Tahun	Luas Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Persentase Luas Baku Sawah Yang Terlayani Air Irigasi
1.	2021	11.071,5	13.027,95	84,98
2.	2022	11.106,5	13.027,95	85,25
3.	2023	11.197,5	13.027,95	85,95

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Perluasan Akses Pelayanan Air Bersih (SR) diperoleh dari perbandingan antara jumlah sambungan rumah yang terbangun dengan jumlah rumah tangga layanan air bersih yang diproyeksikan dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.2 berikut:

Tabel. 12.1.2

Perhitungan Persentase Perluasan Akses Pelayanan Air Bersih (SR)

No.	Tahun	Jumlah Sambungan Rumah yang Terbangun	Jumlah Rumah Tangga Layanan Air Bersih yang Diproyeksikan	Persentase Perluasan Akses Pelayanan Air Bersih (SR)
1.	2021	4.217	186.495	2,26
2.	2022	5.957	186.495	3,19
3.	2023	7.503	186.495	3,52

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Sarana Limbah Domestik Setempat yang Terbangun diperoleh dari perbandingan antara jumlah sambungan rumah (sanitasi) yang terbangun dengan jumlah rumah tangga area pelayanan yang diproyeksikan dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.3 berikut:

Tabel. 12.1.3
Perhitungan Persentase Sarana Limbah Domestik Setempat yang Terbangun

No.	Tahun	Jumlah Sambungan Rumah (Sanitasi) yang Terbangun	Jumlah Rumah Tangga Area Pelayanan yang Diproyeksikan	Persentase Sarana Limbah Domestik Setempat yang Terbangun
1.	2021	440	6.302	6,98
2.	2022	1.080	7.424	14,53
3.	2023	1.605	9.723	18,89

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik diperoleh dari perbandingan antara panjang saluran drainase kondisi baik dengan total 2x panjang jalan Kabupaten dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.4 berikut:

Tabel. 12.1.4
Perhitungan Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik

No.	Tahun	Panjang Saluran Drainase Kondisi Baik	Total 2x Panjang Jalan Kabupaten	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik
1.	2018	46,937	1.486,04	3,16
2.	2019	52,367	1.486,04	3,52
3.	2020	59,220	1.486,04	3,99
4.	2021	77,138	1.723,34	4,48
5.	2022	82,515	1.723,34	4,79
6.	2023	88,12	1.723,34	5,11

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap diperoleh dari perbandingan antara panjang jalan Kabupaten kondisi baik ditambah panjang jalan Kabupaten kondisi sedang dengan total panjang jalan Kabupaten dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.5 berikut:

Tabel. 12.1.5

Perhitungan Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

No.	Tahun	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik + Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Total Panjang Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
1.	2021	550,787	743,02	74,13
2.	2022	571,32	743,02	76,89
3.	2023	746,884	1.038,77	71,90

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah jembatan yang ditingkatkan atau dipelihara dengan jumlah total jembatan dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.6 berikut:

Tabel. 12.1.6

Perhitungan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

No.	Tahun	Jumlah Jembatan yang Ditingkatkan atau Dipelihara	Jumlah Total Jembatan	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik
1.	2021	384	448	85,71
2.	2022	386	448	86,16
3.	2023	288	448	86,607

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Peningkatan SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat diperoleh dari perbandingan antara jumlah SDM jasa konstruksi yang dibina (bersertifikat) dengan total jumlah peningkatan SDM jasa konstruksi (bersertifikat) yang direncanakan dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.7 berikut:

Tabel. 12.1.7
Perhitungan Persentase Peningkatan SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat

No.	Tahun	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Dibina (Bersertifikat)	Total Jumlah Peningkatan SDM Jasa Konstruksi (Bersertifikat) yang Direncanakan	Persentase Peningkatan SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat
1.	2021	203	390	52,05
2.	2022	237	390	60,77
3.	2023	332	390	85,13

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Persentase Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang Tersusun diperoleh dari perbandingan antara jumlah dokumen tata ruang yang disusun dengan total dokumen rencana tata ruang yang akan dicapai dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.8 berikut:

Tabel. 12.1.8
Perhitungan Persentase Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang Tersusun

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Disusun	Total Dokumen Rencana Tata Ruang yang Akan Dicapai	Persentase Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang Tersusun
1.	2021	27	45	60
2.	2022	45	45	100
3.	2023	45	45	100

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel. 12.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio kepatuhan IMB	%	-	-	-	100	100	100
2.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	25,33	100	446,67
3.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi diperoleh dari perbandingan jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dengan jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dengan rincian tersaji pada tabel 12.1.8 berikut:

Tabel. 12.2.1

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

No.	Tahun	tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
1.	2021	114	450	25,33
2.	2022	123	123	100
3.	2023	402	90	446,667

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel. 12.3.1

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak per Kecamatan					
				Tahun					
				2021		2022		2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Tangga	0	100	0	50	0	50
2.	Geger	3519020	Rumah Tangga	0	100	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Tangga	0	0	0	82	0	50
4.	Dagangan	3519040	Rumah Tangga	0	0	0	50	0	50
5.	Wungu	3519050	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	50
6.	Kare	3519060	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	55
7.	Gemarang	3519070	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	50
8.	Saradan	3519080	Rumah Tangga	0	0	0	122	0	50
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Tangga	0	50	0	164	0	110
10.	Mejayan	3519100	Rumah Tangga	0	0	0	82	0	50
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Tangga	0	0	0	32	0	50
13.	Madiun	3519130	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Tangga	0	0	0	50	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel. 12.3.2

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik per Kecamatan					
				Tahun					
				2021		2022		2023	
				Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Tangga	0	100	0	50	0	50
2.	Geger	3519020	Rumah Tangga	0	100	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Tangga	0	0	0	82	0	50
4.	Dagangan	3519040	Rumah Tangga	0	0	0	50	0	50
5.	Wungu	3519050	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	50
6.	Kare	3519060	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	55
7.	Gemarang	3519070	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	50
8.	Saradan	3519080	Rumah Tangga	0	0	0	122	0	50
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Tangga	0	50	0	164	0	110
10.	Mejayan	3519100	Rumah Tangga	0	0	0	82	0	50
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Tangga	0	0	0	32	0	50
13.	Madiun	3519130	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Tangga	0	0	0	50	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Tangga	0	0	0	0	50	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel. 12.3.3

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Akses Air Minum Layak

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Akses Air Minum Layak	Rumah Tangga	5.957	4.217	7.503

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

13. DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2021, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Kesehatan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan mengampu 56 data indikator yang terdiri dari 14 data indikator LPPD & SPM, 10 data indikator RPJMD, 13 data indikator SDGs dan 19 data Kesepakatan Forum Walidata Jawa Timur. Secara lengkap 56 data indikator Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 13.1
Data Statistik Sektor Dinas Kesehatan
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Indeks Kesehatan (UHH SP2010)	-	0,784	0,788	0,790	0,792	0,798	0,804
	Indeks Kesehatan (UHH SP2020)	-	-	-	0,831	0,832	0,836	0,840
2.	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	%	121,25	95,22	86,59	78,46	118,69	111,82
3.	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	%	-	-	66,67	66,67	66,67	100
4.	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	%	-	-	19,42	19,42	22,82	26,21
5.	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	%	-	-	19,23	38,46	46,15	96,15
7.	Prevalensi Balita Stunting	%	15,74	19,31	16,98	14,88	13,13	7,98
8.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	87,36	144,52	173,39	437,45	77,19	133,45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5,31	4,29	7,28	8,25	6,18	8,61
10.	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	100	96,67	100	87,5

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan diperoleh dari perbandingan antara jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah sasaran masyarakat miskin dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.1 berikut:

Tabel. 13.1.1

Perhitungan Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan

No.	Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sasaran Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
1.	2018	266.860	220.091	121,25
2.	2019	295.552	310.403	95,22
3.	2020	268.767	310.403	86,59
4.	2021	243.537	310.403	78,46
5.	2022	368.404	310.403	118,69
6.	2023	347.101	310.403	111,82

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri diperoleh dari perbandingan antara jumlah desa siaga aktif dengan strata purnama dan mandiri dengan jumlah seluruh desa siaga dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.2 berikut:

Tabel. 13.1.2

Perhitungan Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

No.	Tahun	Jumlah Desa Siaga Aktif Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	Jumlah Seluruh Desa Siaga	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri
1.	2020	40	206	19,42
2.	2021	40	206	19,42
3.	2022	47	206	22,82
4.	2023	54	206	26,21

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Puskesmas diperoleh dari perbandingan antara jumlah Puskesmas yang memenuhi standart ASPAK dengan jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Madiun dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.3 berikut:

Tabel. 13.1.3

Perhitungan Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

No.	Tahun	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Standart ASPAK	Jumlah Puskesmas Yang Ada Di Kabupaten Madiun	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
1.	2020	5	26	19,23
2.	2021	10	26	38,46
3.	2022	12	26	46,15
4.	2023	25	26	96,15

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.4 berikut:

Tabel. 13.1.4
Data Angka Kematian Ibu per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Angka Kematian Ibu per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	143,47	158	335,57	0	0
2.	Geger	3519020	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	256,08	0	391,13	0	138,50
3.	Dolopo	3519030	Per 100.000 Kelahiran Hidup	134,95	0	155,52	931,68	0	0
4.	Dagangan	3519040	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	166,11	484,65	340,14	356,51	0
5.	Wungu	3519050	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	270,64	144,72	301,66	166,67	149,03
6.	Kare	3519060	Per 100.000 Kelahiran Hidup	469,48	0	0	602,41	0	0
7.	Gemarang	3519070	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	232,02	253,16	0	254,45
8.	Saradan	3519080	Per 100.000 Kelahiran Hidup	468,93	356,72	342,47	632,91	131,23	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Per 100.000 Kelahiran Hidup	154,08	0	0	843,17	0	0
10.	Mejayan	3519100	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	174,52	168,07	352,73	0	0
11.	Wonoasri	3519110	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	470,59	0	275,48	0	526,32
12.	Balerejo	3519120	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	0	445,43	0	871,46
13.	Madiun	3519130	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	200,40	451,47	0	0	242,13
14.	Sawahan	3519140	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	340,14	362,32	363,64	0
15.	Jiwan	3519150	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	158,73	166,67	161,03	155,04

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.5 berikut:

Tabel. 13.1.5
Data Angka Kematian Bayi per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Angka Kematian Bayi per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,89	5,99	6,31	5,03	0,00	7,62
2.	Geger	3519020	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,67	2,42	5,90	3,91	4,17	11,08
3.	Dolopo	3519030	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,70	1,36	4,67	4,66	3,02	5,93
4.	Dagangan	3519040	Per 1.000 Kelahiran Hidup	7,72	6,15	1,62	3,40	3,57	8,74
5.	Wungu	3519050	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,46	4,41	5,79	4,52	5,00	11,92
6.	Kare	3519060	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,35	4,77	9,64	9,04	8,33	7,89
7.	Gemarang	3519070	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,62	0,00	6,96	20,25	12,47	17,81
8.	Saradan	3519080	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,21	5,84	12,56	6,33	5,25	4,93
9.	Pilangkenceng	3519090	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,08	10,89	7,86	10,12	14,65	7,91
10.	Mejayan	3519100	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,26	1,69	5,04	8,82	5,47	12,75
11.	Wonoasri	3519110	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5,83	2,51	7,50	16,53	9,04	5,26
12.	Balerejo	3519120	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5,81	1,93	6,04	6,68	4,63	4,36
13.	Madiun	3519130	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,77	4,46	15,80	23,81	16,17	4,84
14.	Sawahan	3519140	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,34	6,43	13,61	18,12	3,64	7,02
15.	Jiwan	3519150	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1,40	4,49	4,76	3,33	4,83	10,85

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Data Pravelensi Balita Stunting dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.1.6 berikut:

Tabel. 13.1.6
Data Pravelensi Balita Stunting per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Pravelensi Balita Stunting per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	16,52	9,73	12,2	16,7	11,53	6,26
2.	Geger	3519020	%	13,38	19,25	16,24	13,14	12,69	8,51
3.	Dolopo	3519030	%	13,48	24,39	13,17	14,87	6,14	4,32
4.	Dagangan	3519040	%	18,58	20,3	18,26	17,36	16,99	8,63
5.	Wungu	3519050	%	23,6	26,66	19,35	15,66	15,16	7,69
6.	Kare	3519060	%	22,97	19,78	18,77	10,19	17,73	6,23
7.	Gemarang	3519070	%	21,07	17,39	20,65	16,78	17,98	7,88
8.	Saradan	3519080	%	16,53	28,72	24,72	21,03	20,05	13,99
9.	Pilangkenceng	3519090	%	23,27	28,7	23,69	17,62	13,05	10,85
10.	Mejayan	3519100	%	12,73	11,37	14,62	4,74	4,21	8,41
11.	Wonoasri	3519110	%	6,69	18,98	11,83	14,29	19,33	8,5
12.	Balerejo	3519120	%	13,74	10,46	15,08	14,04	12,07	6,81
13.	Madiun	3519130	%	8,51	8,56	9,32	5,74	3,57	5,98
14.	Sawahan	3519140	%	9,46	20,12	27,52	25	14,52	2,94
15.	Jiwan	3519150	%	11,21	18,06	12,89	18,69	12,45	7,21

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Kesehatan

Tabel. 13.2
Data Statistik Sektor Dinas Kesehatan
Menurut Indikator SPM dan LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	70,25	75,14	81,45	86,54	144,21
2.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	-	73,04	34,56	35,72	77,48	110,80
3.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	40,43	66,65	28,07	86,89	88,26
4.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	-	102,93	97,23	82,49	75,15	102,22
5.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	35,91	14,05	10,04	7,83	24,70	46,84
6.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	49,01	54,03	37,72	24,54	74,35	99,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	47,81	31,66	70,92	99,51	108,13
8.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	32,84	-	52,56	96,74	107,08
9.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	-	-	-	79,5	89,4	93,84
10.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96,81	98,38	96,82	93,08	92,84	91,50
11.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,33	93,61	91,35	88,69	87,87	86,79
12.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,35	91,99	96,59	94,83	89,50	86,41
14.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Jumlah Penduduk	-	-	0,5	0,72	0,58	0,65

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.1 berikut:

Tabel. 13.2.1

Persentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100,00	62,86	68,47	68,39	71,37	73,47
2.	Geger	3519020	%	100,00	91,05	67,64	66,83	86,09	64,62
3.	Dolopo	3519030	%	100,00	80,82	127,14	175,20	179,62	286,02
4.	Dagangan	3519040	%	100,00	79,33	67,69	61,24	61,03	49,02
5.	Wungu	3519050	%	100,00	60,23	86,29	138,51	88,29	135,43
6.	Kare	3519060	%	100,00	97,89	59,95	64,68	93,64	70,70
7.	Gemarang	3519070	%	100,00	46,35	87,72	81,02	71,53	109,62
8.	Saradan	3519080	%	100,00	61,43	66,63	75,86	80,47	83,10
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100,00	116,74	69,62	60,57	61,13	88,92
10.	Mejayan	3519100	%	100,00	83,37	111,20	68,14	79,02	168,40
11.	Wonoasri	3519110	%	100,00	61,67	91,65	91,43	101,42	131,04
12.	Balerejo	3519120	%	100,00	56,81	43,15	50,82	67,85	112,24
13.	Madiun	3519130	%	100,00	49,49	54,26	50,73	55,68	65,48
14.	Sawahan	3519140	%	100,00	61,52	53,57	47,80	73,65	99,70
15.	Jiwan	3519150	%	100,00	68,47	56,02	73,10	65,89	84,64

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.2 berikut:

Tabel. 13.2.2
Persentase Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC
sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	160,81	30,66	28,28	97,31	160,28
2.	Geger	3519020	%	138,35	66,13	50,72	77,92	135,15
3.	Dolopo	3519030	%	59,14	43,69	25,60	71,78	102,10
4.	Dagangan	3519040	%	56,42	20,44	23,22	168,31	367,55
5.	Wungu	3519050	%	67,70	70,95	53,17	61,22	94,29
6.	Kare	3519060	%	85,48	32,93	13,48	34,88	130,91
7.	Gemarang	3519070	%	61,29	7,81	5,62	65,28	125,81
8.	Saradan	3519080	%	87,71	26,80	21,26	155,96	93,67
9.	Pilangkenceng	3519090	%	110,56	17,56	16,02	103,07	128,13
10.	Mejayan	3519100	%	26,44	11,77	30,83	43,46	64,01
11.	Wonoasri	3519110	%	120,67	35,11	48,88	142,52	176,00
12.	Balerejo	3519120	%	133,05	34,19	83,99	126,33	187,57
13.	Madiun	3519130	%	85,09	38,07	15,61	64,34	142,34
14.	Sawahan	3519140	%	131,18	34,19	40,54	79,62	142,24
15.	Jiwan	3519150	%	104,74	31,48	39,90	126,97	174,64

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.3 berikut:

Tabel. 13.2.3

Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	32,27	63,49	28,02	96,82	80,06
2.	Geger	3519020	%	38,04	62,27	29,01	62,57	73,79
3.	Dolopo	3519030	%	39,11	63,20	31,87	81,48	82,75
4.	Dagangan	3519040	%	41,74	68,32	32,18	82,69	94,35
5.	Wungu	3519050	%	17,01	61,54	31,87	77,59	74,90
6.	Kare	3519060	%	45,48	65,34	34,05	50,39	85,99
7.	Gemarang	3519070	%	42,92	67,75	34,99	133,65	92,35
8.	Saradan	3519080	%	32,86	65,78	28,83	100,68	98,01
9.	Pilangkenceng	3519090	%	54,31	74,04	23,13	65,60	72,48
10.	Mejayan	3519100	%	49,14	68,18	27,69	93,73	94,96
11.	Wonoasri	3519110	%	42,79	67,38	26,77	95,88	85,79
12.	Balerejo	3519120	%	37,36	74,14	22,27	102,94	99,76
13.	Madiun	3519130	%	29,73	65,22	25,63	68,66	98,90
14.	Sawahan	3519140	%	73,95	66,13	25,40	112,43	99,83
15.	Jiwan	3519150	%	52,50	69,44	21,34	96,66	102,18

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.4 berikut:

Tabel. 13.2.4

Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	121,00	80,00	77,23	76,00	113,86
2.	Geger	3519020	%	144,25	140,71	91,07	100,88	95,58
3.	Dolopo	3519030	%	115,00	125,49	88,12	80,39	95,10
4.	Dagangan	3519040	%	87,36	81,61	79,78	88,64	95,45
5.	Wungu	3519050	%	74,77	63,55	86,92	56,07	91,59
6.	Kare	3519060	%	112,07	127,59	78,95	81,03	117,24
7.	Gemarang	3519070	%	118,33	103,33	73,33	83,61	98,33
8.	Saradan	3519080	%	106,56	76,86	88,52	59,02	106,56
9.	Pilangkenceng	3519090	%	78,79	102,02	79,59	78,79	96,97
10.	Mejayan	3519100	%	134,15	132,93	83,53	67,07	135,37
11.	Wonoasri	3519110	%	101,64	100,00	83,61	83,87	119,35
12.	Balerejo	3519120	%	91,25	125,93	86,25	79,01	112,35
13.	Madiun	3519130	%	72,22	63,89	76,39	68,49	89,04
14.	Sawahan	3519140	%	95,65	95,65	67,39	54,35	78,72
15.	Jiwan	3519150	%	86,36	58,72	80,18	69,09	91,89

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.5 berikut:

Tabel. 13.2.5

Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	19,98	3,74	9,16	7,77	13,38	23,04
2.	Geger	3519020	%	24,20	14,02	9,80	7,12	14,84	19,61
3.	Dolopo	3519030	%	20,99	7,98	9,92	7,53	15,64	29,23
4.	Dagangan	3519040	%	63,55	32,63	10,00	7,81	26,23	41,05
5.	Wungu	3519050	%	18,93	14,82	10,01	8,01	14,56	22,13
6.	Kare	3519060	%	21,56	24,91	9,81	7,72	44,74	55,75
7.	Gemarang	3519070	%	48,91	13,43	9,51	7,49	15,72	26,79
8.	Saradan	3519080	%	18,66	11,88	9,99	7,55	53,00	100,07
9.	Pilangkenceng	3519090	%	52,06	6,93	10,39	7,93	19,69	44,42
10.	Mejayan	3519100	%	22,65	36,07	10,77	8,66	53,26	60,93
11.	Wonoasri	3519110	%	154,52	27,49	9,25	6,98	14,24	21,40
12.	Balerejo	3519120	%	19,37	7,24	10,99	8,82	28,45	40,08
13.	Madiun	3519130	%	29,43	8,13	10,90	8,68	15,35	22,98
14.	Sawahan	3519140	%	39,11	4,34	10,27	8,32	16,80	18,64
15.	Jiwan	3519150	%	33,55	6,04	10,02	7,55	21,00	126,88

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.6 berikut:

Tabel. 13.2.6

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	45,30	43,03	8,89	16,12	81,74	100,04
2.	Geger	3519020	%	40,05	50,14	25,21	25,40	78,80	99,98
3.	Dolopo	3519030	%	37,65	46,04	39,79	21,40	100,00	104,38
4.	Dagangan	3519040	%	66,98	58,81	20,44	13,87	80,30	89,34
5.	Wungu	3519050	%	33,30	40,12	3,28	11,58	76,91	97,64
6.	Kare	3519060	%	41,01	13,78	0,00	3,77	62,10	96,77
7.	Gemarang	3519070	%	40,97	45,64	56,03	7,66	96,85	74,94
8.	Saradan	3519080	%	41,22	49,50	23,15	24,55	77,15	109,47
9.	Pilangkenceng	3519090	%	64,67	78,50	12,63	65,88	62,06	95,38
10.	Mejayan	3519100	%	53,40	118,73	52,20	40,63	58,65	98,31
11.	Wonoasri	3519110	%	38,07	45,04	34,35	15,40	62,05	100,46
12.	Balerejo	3519120	%	74,72	49,91	272,39	61,46	59,11	116,91
13.	Madiun	3519130	%	42,61	47,35	0,00	15,50	54,29	91,77
14.	Sawahan	3519140	%	75,03	103,23	68,67	3,92	91,89	101,24
15.	Jiwan	3519150	%	53,56	37,38	5,40	19,31	69,83	103,22

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.7 berikut:

Tabel. 13.2.7

Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	101,25	29,85	73,43	88,82	100,32
2.	Geger	3519020	%	18,68	20,86	63,87	97,54	118,37
3.	Dolopo	3519030	%	52,71	46,01	69,84	111,54	123,44
4.	Dagangan	3519040	%	68,42	30,97	70,54	101,03	113,75
5.	Wungu	3519050	%	64,71	29,06	59,55	92,94	105,75
6.	Kare	3519060	%	46,58	29,10	41,37	106,20	108,69
7.	Gemarang	3519070	%	10,40	21,04	65,96	100,87	102,77
8.	Saradan	3519080	%	32,50	20,03	65,78	97,42	100,00
9.	Pilangkenceng	3519090	%	22,58	38,74	78,61	76,29	77,44
10.	Mejayan	3519100	%	53,34	39,52	95,70	98,18	109,72
11.	Wonoasri	3519110	%	161,31	20,67	47,50	104,98	118,68
12.	Balerejo	3519120	%	21,25	46,43	97,29	108,38	115,09
13.	Madiun	3519130	%	36,86	33,00	82,64	113,77	134,99
14.	Sawahan	3519140	%	25,34	27,75	77,22	118,33	112,03
15.	Jiwan	3519150	%	20,80	38,29	70,31	98,37	96,31

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.8 berikut:

Tabel. 13.2.8
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	41,16	-	65,74	133,71	135,85
2.	Geger	3519020	%	30,23	-	49,00	103,18	102,87
3.	Dolopo	3519030	%	44,49	-	27,65	109,27	138,80
4.	Dagangan	3519040	%	40,20	-	33,20	121,12	111,02
5.	Wungu	3519050	%	22,36	-	31,61	49,43	72,57
6.	Kare	3519060	%	29,47	-	102,80	100,44	110,29
7.	Gemarang	3519070	%	24,72	-	88,06	88,31	87,58
8.	Saradan	3519080	%	37,02	-	60,69	108,67	107,72
9.	Pilangkenceng	3519090	%	31,56	-	78,66	102,02	107,40
10.	Mejayan	3519100	%	49,72	-	102,42	150,35	154,26
11.	Wonoasri	3519110	%	27,35	-	90,13	101,05	97,92
12.	Balerejo	3519120	%	28,60	-	55,37	91,10	87,41
13.	Madiun	3519130	%	25,43	-	18,60	29,36	84,93
14.	Sawahan	3519140	%	31,65	-	1,60	82,89	88,38
15.	Jiwan	3519150	%	23,20	-	8,06	68,01	100,94

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.9 berikut:

Tabel. 13.2.9

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar per Kecamatan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	79,39	78,33	78,13
2.	Geger	3519020	%	74,37	90,25	92,15
3.	Dolopo	3519030	%	73,27	92,34	99,86
4.	Dagangan	3519040	%	74,66	89,94	96,21
5.	Wungu	3519050	%	68,02	88,64	95,74
6.	Kare	3519060	%	79,25	78,65	92,73
7.	Gemarang	3519070	%	99,38	99,43	98,86
8.	Saradan	3519080	%	73,24	81,59	86,82
9.	Pilangkenceng	3519090	%	88,80	93,69	95,68
10.	Mejayan	3519100	%	84,74	92,58	95,21
11.	Wonoasri	3519110	%	95,38	98,64	96,37
12.	Balerejo	3519120	%	79,41	83,47	94,26
13.	Madiun	3519130	%	89,85	103,57	105,04
14.	Sawahan	3519140	%	81,27	84,81	98,55
15.	Jiwan	3519150	%	74,07	91,93	94,02

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.10 berikut:

Tabel. 13.2.10
Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	98,30	95,70	91,44	90,83	90,25	87,80
2.	Geger	3519020	%	102,15	105,89	109,34	104,65	98,89	96,40
3.	Dolopo	3519030	%	104,37	105,58	92,74	98,47	101,85	87,98
4.	Dagangan	3519040	%	105,25	106,15	104,03	101,95	100,18	93,53
5.	Wungu	3519050	%	89,73	92,15	93,98	95,38	87,57	92,85
6.	Kare	3519060	%	105,19	104,75	104,82	71,39	93,51	101,32
7.	Gemarang	3519070	%	99,77	107,18	103,88	99,23	103,11	101,02
8.	Saradan	3519080	%	99,19	101,66	103,02	98,47	96,14	89,29
9.	Pilangkenceng	3519090	%	93,25	93,84	94,35	88,71	88,75	83,39
10.	Mejayan	3519100	%	104,50	103,32	108,82	102,98	103,20	98,18
11.	Wonoasri	3519110	%	79,81	93,65	93,08	90,93	83,21	89,47
12.	Balerejo	3519120	%	91,65	93,15	90,13	84,62	83,07	97,60
13.	Madiun	3519130	%	90,10	89,58	88,62	80,30	79,53	85,23
14.	Sawahan	3519140	%	90,21	97,20	89,31	90,40	91,95	96,14
15.	Jiwan	3519150	%	92,51	87,66	83,51	84,53	87,93	82,48

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.11 berikut:

Tabel. 13.2.11

Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	90,41	88,81	84,89	82,22	81,58	83,45
2.	Geger	3519020	%	95,71	99,03	102,57	97,67	93,20	93,54
3.	Dolopo	3519030	%	94,38	94,83	84,27	89,49	92,59	84,18
4.	Dagangan	3519040	%	96,85	99,09	93,21	94,79	91,12	89,52
5.	Wungu	3519050	%	86,28	88,18	90,92	91,81	83,71	88,21
6.	Kare	3519060	%	98,38	97,66	84,32	77,19	90,89	96,49
7.	Gemarang	3519070	%	97,08	102,05	96,30	92,68	95,07	94,17
8.	Saradan	3519080	%	90,59	93,47	93,94	82,33	86,59	82,53
9.	Pilangkenceng	3519090	%	89,88	89,06	88,78	88,02	81,02	80,24
10.	Mejayan	3519100	%	95,54	94,68	97,06	96,56	93,39	93,92
11.	Wonoasri	3519110	%	78,80	91,59	95,26	89,25	84,09	86,25
12.	Balerejo	3519120	%	90,85	92,16	89,35	86,10	82,69	86,69
13.	Madiun	3519130	%	92,90	92,39	91,88	82,89	82,71	81,11
14.	Sawahan	3519140	%	90,61	95,40	90,99	90,49	90,73	91,97
15.	Jiwan	3519150	%	95,45	90,51	86,26	86,67	90,78	78,73

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Data Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.2.12 berikut:

Tabel. 13.2.12
Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	89,10	88,18	93,05	93,89	78,33	78,21
2.	Geger	3519020	%	95,22	94,69	101,99	99,63	94,89	91,73
3.	Dolopo	3519030	%	93,88	92,56	88,07	93,24	95,04	89,47
4.	Dagangan	3519040	%	93,99	95,22	101,17	94,11	89,97	87,82
5.	Wungu	3519050	%	85,56	86,72	97,86	93,76	82,68	88,77
6.	Kare	3519060	%	98,90	97,54	104,98	99,28	92,53	97,14
7.	Gemarang	3519070	%	93,16	100,22	97,59	100,46	100,47	96,77
8.	Saradan	3519080	%	90,20	93,27	99,58	96,01	90,15	81,18
9.	Pilangkenceng	3519090	%	91,23	89,77	99,06	96,60	83,81	74,28
10.	Mejayan	3519100	%	94,54	93,55	97,36	92,45	95,51	98,99
11.	Wonoasri	3519110	%	81,54	83,74	95,49	92,62	90,14	86,67
12.	Balerejo	3519120	%	86,82	89,73	91,51	90,86	83,39	76,85
13.	Madiun	3519130	%	89,02	91,60	94,26	85,80	81,65	75,56
14.	Sawahan	3519140	%	90,43	95,59	101,19	103,46	100,95	100,32
15.	Jiwan	3519150	%	94,77	91,09	89,38	93,10	91,49	84,53

Sumber data : Indikator SPM dan LPPD Dinas Kesehatan

Tabel. 13.3
Data Statistik Sektor Dinas Kesehatan
Menurut Indikator SDGs

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kejadian Malaria per 1.000 orang	per 1.000 orang	0,04	0,08	0,03	0,01	0,03	0,04
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	%	-	19,1	16,46	25,05	12,87	6,21
3.	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan)	%	8,11	9,03	10,29	10,32	12,39	12,47
4.	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan)	%	-	6,39	8,19	8,51	9,95	9,49
5.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 orang	2,33	8,3	8,1	10,13	7,27	9,08
6.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 orang	5,08	5,30	5,90	9,62	4,12	6,67
7.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	68,42	89,47	71,05	63,16	68,42	68,42
8.	Persentase penderita HIV yang mendapat ARV	%	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase keberhasilan pengobatan TB	%	97,64	75,36	52,71	89,26	80,74	88,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Persentase Balita obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 bulan	%	-	-	-	-	2,07	1,82
11.	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	12,17	14,05	10,04	7,83	24,70	46,84
12.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	56,91	59,57	59,47	78,03	46,06	96,49
13.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	76,59	81,00	75,29	85,79	60,58	74,25

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Kejadian Malaria per 1000 orang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penderita malaria dengan jumlah penduduk dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.1 berikut:

Tabel. 13.3.1
Perhitungan Kejadian Malaria per 1000

No.	Tahun	Jumlah Penderita Malaria	Jumlah Penduduk	Kejadian Malaria per 1000 Orang
1.	2018	27	681.394	0,04
2.	2019	52	682.684	0,08
3.	2020	19	683.784	0,03
4.	2021	8	685.490	0,01
5.	2022	18	686.525	0,03
6.	2023	27	687.381	0,04

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.2 berikut:

Tabel. 13.3.2
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	12,55	11,69	48,71	11,27	4,98
2.	Geger	3519020	%	19,69	16,05	10,48	13,24	7,58
3.	Dolopo	3519030	%	25,44	13,44	17,73	6,65	3,10
4.	Dagangan	3519040	%	21,84	15,12	18,3	16,97	5,33
5.	Wungu	3519050	%	27,78	17,8	18,43	16,54	4,90
6.	Kare	3519060	%	18,98	17,47	9,28	17,28	5,30
7.	Gemarang	3519070	%	15,29	23,74	20,18	21,44	5,29
8.	Saradan	3519080	%	22,82	19,26	53,06	16,24	10,41
9.	Pilangkenceng	3519090	%	27,89	26,09	18,37	10,41	9,27
10.	Mejayan	3519100	%	11,59	12,26	7,62	6,58	7,23
11.	Wonoasri	3519110	%	18,98	12,88	20,26	18,93	5,96
12.	Balerejo	3519120	%	10,07	15,26	14,26	11,35	6,03
13.	Madiun	3519130	%	7,7	8,21	5,58	2,65	2,55
14.	Sawahan	3519140	%	15,71	25,07	21,21	10,94	3,49
15.	Jiwan	3519150	%	20,08	16,19	65,89	10,77	6,87

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan) dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.3 berikut:

Tabel. 13.3.3
Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan)
per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan) per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	6,41	5,93	8,42	9,88	11,6	10,00
2.	Geger	3519020	%	7,51	7,97	9,41	10,1	11,06	11,91
3.	Dolopo	3519030	%	5,25	6,5	8,09	7,97	10,74	9,92
4.	Dagangan	3519040	%	9,11	11,88	12,33	13,58	13,84	12,70
5.	Wungu	3519050	%	9,03	9,44	10,39	9,35	10,14	12,21
6.	Kare	3519060	%	8,54	10,25	10,54	10,45	13,4	11,53
7.	Gemarang	3519070	%	7,95	8,61	8,37	9,52	12,71	12,34
8.	Saradan	3519080	%	11,08	13,35	14,01	15,01	15,45	15,78
9.	Pilangkenceng	3519090	%	9,91	11,68	11,08	10,66	16,76	15,48
10.	Mejayan	3519100	%	10,35	5,65	8,2	3,04	6,05	12,42
11.	Wonoasri	3519110	%	6,75	12,76	11,9	13,82	15,17	14,38
12.	Balerejo	3519120	%	6,98	8,16	11,15	10,53	12,33	12,45
13.	Madiun	3519130	%	8,13	6,64	10,03	9,64	10,98	11,95
14.	Sawahan	3519140	%	3,21	4,79	8,87	29,73	13,37	10,60
15.	Jiwan	3519150	%	5,28	9,3	11,17	10,67	11,99	10,39

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan) dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.4 berikut:

Tabel. 13.3.4
Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan)
per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan) per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	4,87	7,18	16,01	8,4	8,57
2.	Geger	3519020	%	6,71	7,37	6,7	9,82	11,00
3.	Dolopo	3519030	%	5,62	7,00	8,94	9,29	7,49
4.	Dagangan	3519040	%	7,6	8,99	10,64	14,00	9,05
5.	Wungu	3519050	%	6,94	7,25	7,69	7,86	8,73
6.	Kare	3519060	%	7,2	8,84	8,73	10,25	6,58
7.	Gemarang	3519070	%	5,33	5,69	5,87	10,49	6,53
8.	Saradan	3519080	%	7,78	12,58	10,41	10,92	11,38
9.	Pilangkenceng	3519090	%	6,33	9,34	7,84	12,62	11,06
10.	Mejayan	3519100	%	4,91	6,43	8,18	6,76	10,18
11.	Wonoasri	3519110	%	10,76	7,31	7,68	10,34	10,61
12.	Balerejo	3519120	%	5,23	8,18	6,32	8,62	10,48
13.	Madiun	3519130	%	4,28	8,74	10,12	7,79	10,53
14.	Sawahan	3519140	%	3,41	8,74	4,17	11,52	9,73
15.	Jiwan	3519150	%	7,25	8,82	6,02	9,48	8,93

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.5 berikut:

Tabel. 13.3.5
Data Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup
per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	7,49	7,89	5,03	0	9,15
2.	Geger	3519020	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,48	10,88	5,9	6,52	5,56	11,08
3.	Dolopo	3519030	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	5,42	4,67	4,66	3,02	5,93
4.	Dagangan	3519040	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,63	7,69	4,85	3,4	3,57	8,74
5.	Wungu	3519050	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	11,75	7,24	6,03	8,33	11,92
6.	Kare	3519060	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,34	7,16	9,64	12,05	8,33	7,89
7.	Gemarang	3519070	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,62	11,14	6,96	22,78	12,47	17,81
8.	Saradan	3519080	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5,86	4,67	13,7	7,59	6,56	4,93
9.	Pilangkenceng	3519090	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1,54	10,89	7,86	11,8	14,65	9,49
10.	Mejayan	3519100	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	5,07	5,04	8,82	7,3	14,57
11.	Wonoasri	3519110	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5,8	20,1	7,5	19,28	9,04	5,26
12.	Balerejo	3519120	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,88	3,87	6,04	6,68	6,94	6,54
13.	Madiun	3519130	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	6,7	15,8	31,75	18,87	7,26
14.	Sawahan	3519140	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,34	6,43	13,61	18,12	3,64	7,02
15.	Jiwan	3519150	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4	2,99	6,35	3,33	4,83	10,85

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.6 berikut:

Tabel. 13.3.6
Data Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup
per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Data Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,89	7,49	6,31	5,03	0	7,62
2.	Geger	3519020	Per 1.000 Kelahiran Hidup	7,43	6,05	3,54	6,52	2,78	8,31
3.	Dolopo	3519030	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,7	4,07	4,67	4,66	3,02	4,45
4.	Dagangan	3519040	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,63	1,54	1,62	3,4	3,57	3,5
5.	Wungu	3519050	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,46	5,87	5,79	6,03	1,67	11,92
6.	Kare	3519060	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	2,39	7,23	12,05	2,78	5,26
7.	Gemarang	3519070	Per 1.000 Kelahiran Hidup	20,79	6,68	6,96	22,78	4,99	5,09
8.	Saradan	3519080	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,69	2,34	7,99	7,59	5,25	4,93
9.	Pilangkenceng	3519090	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,08	9,33	7,86	11,8	12,82	4,75
10.	Mejayan	3519100	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,26	5,07	1,68	8,82	3,65	10,93
11.	Wonoasri	3519110	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	17,59	5	19,28	9,04	2,63
12.	Balerejo	3519120	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1,94	3,87	6,04	6,68	2,31	4,36
13.	Madiun	3519130	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,77	4,46	11,29	31,75	8,09	4,84
14.	Sawahan	3519140	Per 1.000 Kelahiran Hidup	10,03	3,22	13,61	18,12	3,64	7,02
15.	Jiwan	3519150	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4	2,99	4,76	3,33	1,61	10,85

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi diperoleh dari perbandingan antara jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dalam waktu satu tahun dengan jumlah Kabupaten/Kota di suatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.7 berikut:

Tabel. 13.3.7

Perhitungan Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

No.	Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Dalam Waktu Satu Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota di Suatu Wilayah Kerja dan pada Kurun Waktu yang Sama	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
1.	2018	26	38	68,42
2.	2019	34	38	89,47
3.	2020	27	38	71,05
4.	2021	24	38	63,16
5.	2022	26	38	68,42
6.	2023	26	38	68,42

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Persentase Keberhasilan Pengobatan TB dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.8 berikut:

Tabel. 13.3.8
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	97,22	75,51	43,59	89,74	92,31	95,24
2.	Geger	3519020	%	100	87,5	55,88	76,47	89,29	88,24
3.	Dolopo	3519030	%	100	97,56	51,25	82,35	80,3	96,4
4.	Dagangan	3519040	%	100	70,97	76,92	84,62	100	90,91
5.	Wungu	3519050	%	98,31	88,89	42,95	92,67	89,84	87,17
6.	Kare	3519060	%	100	64,29	53,85	76,92	100	77,78
7.	Gemarang	3519070	%	100	45,45	40	100	88,89	77,78
8.	Saradan	3519080	%	100	49,22	77,08	87,5	83,33	95,06
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	74,29	41,67	100	93,75	89,29
10.	Mejayan	3519100	%	91,97	65,71	56,25	90,53	68,55	83,97
11.	Wonoasri	3519110	%	100	87,5	68,18	95,65	60	95,24
12.	Balerejo	3519120	%	100	95	46,43	96,43	85,71	79,31
13.	Madiun	3519130	%	100	116,67	61,54	92,86	77,78	80,00
14.	Sawahan	3519140	%	100	75	50	100	90,91	94,12
15.	Jiwan	3519150	%	100	65,38	50	89,29	65,22	87,80

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Prevalensi Tenakan Darah Tinggi dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.9 berikut:

Tabel. 13.3.9
Prevalensi Tenakan Darah Tinggi per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Prevalensi Tenakan Darah Tinggi per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	6,78	3,74	9,16	7,77	13,38	23,04
2.	Geger	3519020	%	8,28	14,02	9,80	7,12	14,84	19,61
3.	Dolopo	3519030	%	7,12	7,98	9,92	7,53	15,64	29,23
4.	Dagangan	3519040	%	21,26	32,63	10,00	7,81	26,23	41,05
5.	Wungu	3519050	%	6,45	14,82	10,01	8,01	14,56	22,13
6.	Kare	3519060	%	7,40	24,91	9,81	7,72	44,74	55,75
7.	Gemarang	3519070	%	16,83	13,43	9,51	7,49	15,72	26,79
8.	Saradan	3519080	%	6,42	11,88	9,99	7,55	53,00	100,07
9.	Pilangkenceng	3519090	%	17,62	6,93	10,39	7,93	19,69	44,42
10.	Mejayan	3519100	%	7,53	36,07	10,77	8,66	53,26	60,93
11.	Wonoasri	3519110	%	53,23	27,49	9,25	6,98	14,24	21,40
12.	Balerejo	3519120	%	6,42	7,24	10,99	8,82	28,45	40,08
13.	Madiun	3519130	%	9,63	8,13	10,9	8,68	15,35	22,98
14.	Sawahan	3519140	%	13,17	4,34	10,27	8,32	16,8	18,64
15.	Jiwan	3519150	%	11,46	6,04	10,02	7,55	21,00	126,88

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh penduduk di wilayah pada kurun waktu yang sama dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.10 berikut:

Tabel. 13.3.10
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No.	Tahun	Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	Jumlah seluruh penduduk di wilayah pada kurun waktu yang sama	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
1.	2018	387.769	681.394	56,91
2.	2019	406.645	682.684	59,57
3.	2020	406.645	683.784	59,47
4.	2021	534.886	685.490	78,03
5.	2022	316.185	686.525	46,06
6.	2023	729.233	755.733	96,49

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Data Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI eksklusif dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 13.3.11 berikut:

Tabel. 13.3.11

Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI eksklusif per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI eksklusif per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	86,06	96,57	84,52	96,10	58,01	85,13
2.	Geger	3519020	%	73,86	78,13	59,26	78,51	53,08	76,75
3.	Dolopo	3519030	%	76,91	83,53	64,00	82,44	77,22	64,93
4.	Dagangan	3519040	%	83,89	80,91	80,88	73,28	55,99	74,65
5.	Wungu	3519050	%	64,85	74,68	76,32	68,75	45,26	81,76
6.	Kare	3519060	%	79,63	58,27	94,12	65,17	49,22	74,84
7.	Gemarang	3519070	%	90,36	94,60	55,56	95,45	96,85	100,00
8.	Saradan	3519080	%	74,82	73,36	78,10	85,63	55,74	58,55
9.	Pilangkenceng	3519090	%	69,75	78,54	84,71	86,02	60,00	76,49
10.	Mejayan	3519100	%	75,05	80,61	100,00	100,00	76,42	80,69
11.	Wonoasri	3519110	%	70,71	67,21	46,15	91,59	53,09	64,61
12.	Balerejo	3519120	%	71,60	85,59	79,17	92,86	87,23	68,31
13.	Madiun	3519130	%	66,97	68,06	47,37	68,45	61,62	49,45
14.	Sawahan	3519140	%	84,83	100,00	100,00	100,00	65,00	69,87
15.	Jiwan	3519150	%	83,33	93,40	86,84	97,16	18,09	82,84

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.1

Data Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Suspek Campak yang dapat dicegah dengan Imunisasi Menurut Kecamatan

No.	Jenis Kasus Penyakit	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Difteri	Kebonsari	Orang	0	0	0	0
		Geger	Orang	0	0	0	2
		Dolopo	Orang	0	0	0	0
		Dagangan	Orang	0	0	0	0
		Wungu	Orang	0	0	1	1
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	0
		Saradan	Orang	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Orang	0	0	0	0
		Mejayan	Orang	0	0	1	0
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	0	0	0	0
		Madiun	Orang	0	0	0	0
		Sawahan	Orang	0	0	0	0
		Jiwan	Orang	0	0	0	1
		Jumlah	Orang	0	0	2	4
2.	Pertusis	Kebonsari	Orang	0	0	0	1
		Geger	Orang	0	0	0	3
		Dolopo	Orang	0	0	0	0
		Dagangan	Orang	0	0	0	0
		Wungu	Orang	0	0	0	1
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	0
		Saradan	Orang	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Orang	0	0	0	0
		Mejayan	Orang	0	0	0	0
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	0	0	0	0
		Madiun	Orang	0	0	0	0
		Sawahan	Orang	0	0	0	0
		Jiwan	Orang	0	0	0	0
		Jumlah	Orang	0	0	0	5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Tetanus Neonatorum	Kebonsari	Orang	0	0	0	0
		Geger	Orang	0	0	0	0
		Dolopo	Orang	0	0	0	0
		Dagangan	Orang	0	0	0	0
		Wungu	Orang	0	0	0	0
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	0
		Saradan	Orang	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Orang	0	0	0	0
		Mejayan	Orang	0	0	0	0
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	0	0	0	0
		Madiun	Orang	0	0	0	0
		Sawahan	Orang	0	0	0	0
		Jiwan	Orang	0	0	0	0
		Jumlah	Orang	0	0	0	0
4.	Hepatitis B	Kebonsari	Orang	0	0	0	0
		Geger	Orang	0	0	0	0
		Dolopo	Orang	0	0	0	0
		Dagangan	Orang	0	0	0	1
		Wungu	Orang	0	0	0	1
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	3
		Saradan	Orang	0	0	0	1
		Pilangkenceng	Orang	0	0	0	1
		Mejayan	Orang	0	0	0	0
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	0	0	0	1
		Madiun	Orang	0	0	0	0
		Sawahan	Orang	0	0	0	1
		Jiwan	Orang	0	0	0	0
		Jumlah	Orang	0	0	0	9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Suspek Campak	Kebonsari	Orang	0	0	4	3
		Geger	Orang	0	0	5	3
		Dolopo	Orang	0	0	4	5
		Dagangan	Orang	0	0	4	8
		Wungu	Orang	0	0	1	0
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	3	4
		Saradan	Orang	0	0	7	10
		Pilangkenceng	Orang	0	0	3	9
		Mejayan	Orang	0	0	0	4
		Wonoasri	Orang	0	0	0	5
		Balerejo	Orang	0	0	2	2
		Madiun	Orang	0	0	0	4
		Sawahan	Orang	0	0	0	0
		Jiwan	Orang	0	0	2	6
		Jumlah	Orang	0	0	35	63

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.2

**Data Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di
Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS)			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Desa	12	14	14	14
2.	Geger	3519020	Desa	14	19	19	19
3.	Dolopo	3519030	Desa	9	12	12	12
4.	Dagangan	3519040	Desa	8	17	17	17
5.	Wungu	3519050	Desa	8	14	14	14
6.	Kare	3519060	Desa	7	8	8	8
7.	Gemarang	3519070	Desa	2	7	7	7
8.	Saradan	3519080	Desa	13	15	15	15
9.	Pilangkenceng	3519090	Desa	14	18	18	18
10.	Mejayan	3519100	Desa	10	14	14	14
11.	Wonoasri	3519110	Desa	8	10	10	10
12.	Balerejo	3519120	Desa	18	18	18	18
13.	Madiun	3519130	Desa	11	13	13	13
14.	Sawahan	3519140	Desa	13	13	13	13
15.	Jiwan	3519150	Desa	13	14	14	14

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.3

**Data Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Menurut Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS)			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	36	21	30	47
2.	Geger	3519020	Orang	63	51	57	49
3.	Dolopo	3519030	Orang	12	19	17	8
4.	Dagangan	3519040	Orang	25	29	32	38
5.	Wungu	3519050	Orang	30	40	37	39
6.	Kare	3519060	Orang	4	14	6	23
7.	Gemarang	3519070	Orang	23	33	31	25
8.	Saradan	3519080	Orang	42	59	28	46
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	28	37	33	32
10.	Mejayan	3519100	Orang	10	15	11	13
11.	Wonoasri	3519110	Orang	25	21	19	17
12.	Balerejo	3519120	Orang	27	25	24	24
13.	Madiun	3519130	Orang	21	29	17	15
14.	Sawahan	3519140	Orang	9	15	17	11
15.	Jiwan	3519150	Orang	31	26	32	30

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.4
Data Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI)
Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI)			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Desa	0	0	0	2
2.	Geger	3519020	Desa	5	5	2	3
3.	Dolopo	3519030	Desa	2	2	2	2
4.	Dagangan	3519040	Desa	2	2	2	2
5.	Wungu	3519050	Desa	1	1	0	3
6.	Kare	3519060	Desa	1	0	3	4
7.	Gemarang	3519070	Desa	4	4	7	0
8.	Saradan	3519080	Desa	7	7	6	8
9.	Pilangkenceng	3519090	Desa	3	0	3	0
10.	Mejayan	3519100	Desa	0	0	7	13
11.	Wonoasri	3519110	Desa	2	0	3	2
12.	Balerejo	3519120	Desa	6	10	5	6
13.	Madiun	3519130	Desa	0	2	0	0
14.	Sawahan	3519140	Desa	3	3	3	4
15.	Jiwan	3519150	Desa	4	4	4	5

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.5

Data Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditangani kurang dari 24 Jam Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditangani kurang dari 24 Jam per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	1	0	1	1
2.	Geger	3519020	Orang	1	0	1	2
3.	Dolopo	3519030	Orang	1	0	1	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Orang	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Orang	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	0	0	1	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	1	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	0	0	1	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	1	0	1	0
13.	Madiun	3519130	Orang	1	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	0	1	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	0	0	1

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.6

Data Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan

No.	Jenis Kasus Penyakit	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Tuberkulosis	Kebonsari	Orang	39	26	39	30
		Geger	Orang	34	28	28	32
		Dolopo	Orang	80	66	123	139
		Dagangan	Orang	13	17	20	19
		Wungu	Orang	149	129	294	255
		Kare	Orang	13	6	6	18
		Gemarang	Orang	5	5	9	4
		Saradan	Orang	48	27	75	64
		Pilangkenceng	Orang	12	16	28	42
		Mejayan	Orang	96	139	259	310
		Wonoasri	Orang	22	15	21	18
		Balerejo	Orang	28	21	25	36
		Madiun	Orang	13	18	15	24
		Sawahan	Orang	10	11	12	12
		Jiwan	Orang	28	23	41	50
		Jumlah	Orang	590	547	995	1.053
2.	Kusta	Kebonsari	Orang	0	0	0	1
		Geger	Orang	0	2	1	1
		Dolopo	Orang	0	1	1	0
		Dagangan	Orang	0	3	0	2
		Wungu	Orang	3	3	0	1
		Kare	Orang	1	1	1	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	0
		Saradan	Orang	0	0	2	0
		Pilangkenceng	Orang	0	0	1	0
		Mejayan	Orang	0	1	0	1
		Wonoasri	Orang	1	6	3	1
		Balerejo	Orang	1	2	2	3
		Madiun	Orang	1	1	1	0
		Sawahan	Orang	0	1	0	1
		Jiwan	Orang	0	1	0	2
		Jumlah	Orang	7	22	12	13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	HIV	Kebonsari	Orang	1	0	0	0
		Geger	Orang	1	0	0	2
		Dolopo	Orang	12	9	14	24
		Dagangan	Orang	3	0	0	0
		Wungu	Orang	15	25	24	20
		Kare	Orang	0	0	0	2
		Gemarang	Orang	7	2	4	1
		Saradan	Orang	2	1	11	13
		Pilangkenceng	Orang	0	0	2	6
		Mejayan	Orang	61	43	51	64
		Wonoasri	Orang	0	1	0	3
		Balerejo	Orang	0	0	2	2
		Madiun	Orang	2	0	0	0
		Sawahan	Orang	0	0	0	0
		Jiwan	Orang	2	0	3	8
		Jumlah	Orang	106	81	111	145
4.	Demam Berdarah Dengue	Kebonsari	Orang	6	16	28	15
		Geger	Orang	6	6	19	14
		Dolopo	Orang	4	3	9	16
		Dagangan	Orang	4	2	17	17
		Wungu	Orang	7	13	27	15
		Kare	Orang	3	1	9	2
		Gemarang	Orang	1	2	4	1
		Saradan	Orang	21	12	28	9
		Pilangkenceng	Orang	6	2	30	9
		Mejayan	Orang	3	12	26	32
		Wonoasri	Orang	6	6	19	2
		Balerejo	Orang	6	2	17	2
		Madiun	Orang	5	7	18	5
		Sawahan	Orang	2	2	10	6
		Jiwan	Orang	6	33	12	10
		Jumlah	Orang	86	119	273	155

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Covid-19	Kebonsari	Orang	38	732	212	0
		Geger	Orang	61	1.040	289	0
		Dolopo	Orang	22	763	232	0
		Dagangan	Orang	23	702	210	0
		Wungu	Orang	44	842	305	0
		Kare	Orang	8	124	110	0
		Gemarang	Orang	2	193	88	0
		Saradan	Orang	22	436	186	0
		Pilangkenceng	Orang	16	536	158	0
		Mejayan	Orang	53	687	206	0
		Wonoasri	Orang	4	312	98	0
		Balerejo	Orang	10	432	136	0
		Madiun	Orang	28	452	192	0
		Sawahan	Orang	15	328	71	0
		Jiwan	Orang	44	878	282	0
		Jumlah	Orang	390	8.457	2.755	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.7

Data Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Berisiko Usia >15 tahun secara Kumulasi Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Berisiko Usia >15 tahun secara Kumulasi per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	17.713	10.825	31.523	25.923
2.	Geger	3519020	Orang	21.256	13.589	22.869	26.820
3.	Dolopo	3519030	Orang	20.716	12.724	26.726	26.990
4.	Dagangan	3519040	Orang	17.448	10.375	23.371	26.511
5.	Wungu	3519050	Orang	17.768	12.385	26.926	25.851
6.	Kare	3519060	Orang	10.019	6.648	9.461	16.056
7.	Gemarang	3519070	Orang	14.976	7.371	26.215	18.014
8.	Saradan	3519080	Orang	24.253	14.511	39.762	38.503
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	20.658	14.068	20.922	22.997
10.	Mejayan	3519100	Orang	18.850	10.827	24.950	25.142
11.	Wonoasri	3519110	Orang	12.973	6.342	19.139	17.037
12.	Balerejo	3519120	Orang	36.388	10.902	26.825	25.859
13.	Madiun	3519130	Orang	12.464	7.180	16.076	23.033
14.	Sawahan	3519140	Orang	11.152	4.037	16.959	14.979
15.	Jiwan	3519150	Orang	20.847	9.860	34.585	36.363

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.8

Data Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	629	578	567	575
2.	Geger	3519020	Orang	838	756	713	710
3.	Dolopo	3519030	Orang	643	647	662	596
4.	Dagangan	3519040	Orang	604	582	554	538
5.	Wungu	3519050	Orang	691	661	596	620
6.	Kare	3519060	Orang	355	308	359	385
7.	Gemarang	3519070	Orang	417	380	386	388
8.	Saradan	3519080	Orang	852	708	736	705
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	633	595	542	532
10.	Mejayan	3519100	Orang	594	561	537	541
11.	Wonoasri	3519110	Orang	402	357	333	345
12.	Balerejo	3519120	Orang	495	452	430	417
13.	Madiun	3519130	Orang	441	378	373	352
14.	Sawahan	3519140	Orang	293	276	274	275
15.	Jiwan	3519150	Orang	628	598	620	533

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.9

Data Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	80	78	76	115
2.	Geger	3519020	Orang	159	102	114	108
3.	Dolopo	3519030	Orang	128	89	82	97
4.	Dagangan	3519040	Orang	71	71	78	84
5.	Wungu	3519050	Orang	68	93	60	98
6.	Kare	3519060	Orang	74	45	47	68
7.	Gemarang	3519070	Orang	62	44	51	59
8.	Saradan	3519080	Orang	93	108	72	130
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	101	78	78	96
10.	Mejayan	3519100	Orang	109	71	55	111
11.	Wonoasri	3519110	Orang	62	51	52	74
12.	Balerejo	3519120	Orang	102	69	64	91
13.	Madiun	3519130	Orang	46	55	50	65
14.	Sawahan	3519140	Orang	44	31	25	37
15.	Jiwan	3519150	Orang	64	89	76	102

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.10

Data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Kematian Ibu per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	1	2	0	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	3	0	1
3.	Dolopo	3519030	Orang	1	6	0	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	3	2	2	0
5.	Wungu	3519050	Orang	1	2	1	1
6.	Kare	3519060	Orang	0	2	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	1	1	0	1
8.	Saradan	3519080	Orang	3	5	1	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	5	0	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	1	2	0	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	1	0	2
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	2	0	4
13.	Madiun	3519130	Orang	2	0	0	1
14.	Sawahan	3519140	Orang	1	1	1	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	1	1	1	1

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.11.1

Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan															
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Psikologi Teknis	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Teknik Biomedika Lainnya	Kesehatan Tradisional
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	2	2	0	0	21	24	3	2	1	2	1	0	0	1	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	2	2	0	0	13	19	3	0	2	3	0	0	2	1	0
3.	Dolopo	3519030	Orang	16	17	5	0	0	119	53	15	3	2	9	3	2	11	0	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	0	2	2	0	0	23	31	3	1	2	3	0	0	0	2	0
5.	Wungu	3519050	Orang	6	13	3	0	0	94	23	15	4	2	6	7	2	9	1	0
6.	Kare	3519060	Orang	0	2	1	0	0	26	16	1	0	1	2	1	0	1	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	3	1	0	0	25	17	2	0	1	1	1	0	1	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	0	3	2	0	0	35	36	4	3	3	3	2	0	2	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	4	2	0	0	41	38	3	2	2	3	2	0	3	1	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	25	19	5	1	0	277	59	34	1	8	3	5	5	17	0	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	2	1	0	0	8	12	1	1	1	1	0	0	1	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	2	2	0	0	36	28	4	1	2	3	1	0	3	0	0
13.	Madiun	3519130	Orang	0	3	1	0	0	13	16	2	2	2	2	0	0	1	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	1	1	0	0	7	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	2	2	0	0	20	19	2	0	2	3	0	0	1	1	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.11.2

Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan															
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Psikologi Teknis	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Keshatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Teknik Biomedika Lainnya	Kesehatan Tradisional
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	3	2	0	0	19	20	4	1	2	2	1	1	2	0	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	6	2	0	0	13	21	3	1	2	3	0	2	3	0	0
3.	Dolopo	3519030	Orang	21	16	6	1	0	116	49	19	2	3	12	4	4	13	1	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	0	3	2	0	0	19	34	4	1	2	3	0	1	1	0	0
5.	Wungu	3519050	Orang	8	12	4	0	0	99	30	16	7	5	7	7	9	10	5	0
6.	Kare	3519060	Orang	0	2	1	0	0	24	15	2	1	1	1	1	2	1	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	3	2	0	0	23	22	2	0	1	1	1	1	1	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	0	5	2	0	0	35	34	5	3	3	3	2	3	3	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	5	2	0	0	38	38	5	2	2	3	2	3	4	0	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	26	21	3	2	0	274	58	32	7	7	7	6	7	16	0	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	2	1	0	0	7	13	3	1	1	1	0	1	1	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	4	2	0	0	32	29	5	2	2	3	1	1	3	0	0
13.	Madiun	3519130	Orang	0	3	2	0	0	14	18	2	2	1	1	0	1	1	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	1	1	0	0	7	15	2	1	0	1	0	1	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	2	1	0	0	19	21	4	0	2	3	0	2	2	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.11.3

Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan															
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Psikologi Teknis	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Teknik Biomedika Lainnya	Kesehatan Tradisional
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	2	2	0	0	22	26	3	2	2	2	1	2	2	0	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	3	2	0	0	12	20	3	1	2	3	0	3	3	0	0
3.	Dolopo	3519030	Orang	17	30	7	0	0	145	55	11	2	6	8	5	3	11	20	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	0	4	2	0	0	21	32	1	2	3	3	0	2	2	0	0
5.	Wungu	3519050	Orang	9	13	5	0	0	102	33	10	4	5	7	10	4	16	30	0
6.	Kare	3519060	Orang	0	2	1	0	0	25	19	1	1	1	1	1	2	1	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	3	2	0	0	21	21	1	1	1	2	1	1	1	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	0	10	2	0	0	34	39	3	2	4	3	2	2	3	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	4	2	0	0	41	37	3	2	2	3	2	5	4	0	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	26	21	2	2	0	258	60	16	2	2	7	6	5	15	24	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	2	1	0	0	7	13	1	2	1	1	0	1	1	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	4	2	0	0	29	28	4	3	2	2	1	3	3	0	0
13.	Madiun	3519130	Orang	0	4	2	0	0	12	16	1	2	1	1	0	1	1	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	1	1	0	0	9	15	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	4	2	0	0	17	22	1	1	3	3	0	3	2	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.11.4

Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan															
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Psikologi Teknis	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Keshatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Teknik Biomedika Lainnya	Kesehatan Tradisional
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	2	2	0	0	19	24	4	0	1	1	1	2	2	0	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	2	3	0	0	11	21	4	0	2	2	0	3	2	0	0
3.	Dolopo	3519030	Orang	20	30	6	0	0	160	55	17	1	4	7	5	12	11	20	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	0	6	2	0	0	20	31	3	1	2	2	0	2	3	0	0
5.	Wungu	3519050	Orang	9	13	3	0	0	104	35	22	1	5	7	10	17	14	26	0
6.	Kare	3519060	Orang	0	2	1	0	0	24	16	2	0	1	0	1	1	1	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	2	1	0	0	20	20	2	0	1	1	1	1	2	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	0	8	2	0	0	33	38	3	1	2	4	2	2	3	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	5	2	0	0	41	35	4	0	1	2	2	6	4	0	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	29	25	3	2	0	249	59	29	0	2	8	5	14	14	27	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	1	1	0	0	6	13	1	0	1	1	0	1	1	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	5	2	0	0	31	28	5	0	2	3	2	3	3	0	0
13.	Madiun	3519130	Orang	0	4	2	0	0	14	17	3	1	1	2	0	1	2	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	1	1	0	0	10	14	2	0	0	1	0	0	1	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	3	2	0	0	19	22	2	0	2	3	0	3	2	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehata

Tabel. 13.4.12.1

**Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas per Kecamatan			
				Tempat Tidur RS Kelas A	Tempat Tidur RS Kelas B	Tempat Tidur RS Kelas C	Tempat Tidur RS Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Tempat Tidur	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Tempat Tidur	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Tempat Tidur	0	0	103	0
4.	Dagangan	3519040	Tempat Tidur	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Tempat Tidur	0	0	0	57
6.	Kare	3519060	Tempat Tidur	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Tempat Tidur	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Tempat Tidur	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Tempat Tidur	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Tempat Tidur	0	0	214	0
11.	Wonoasri	3519110	Tempat Tidur	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Tempat Tidur	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Tempat Tidur	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Tempat Tidur	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Tempat Tidur	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.12.2

**Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas per Kecamatan			
				Tempat Tidur RS Kelas A	Tempat Tidur RS Kelas B	Tempat Tidur RS Kelas C	Tempat Tidur RS Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Tempat Tidur	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Tempat Tidur	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Tempat Tidur	0	0	263	0
4.	Dagangan	3519040	Tempat Tidur	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Tempat Tidur	0	0	0	56
6.	Kare	3519060	Tempat Tidur	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Tempat Tidur	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Tempat Tidur	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Tempat Tidur	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Tempat Tidur	0	0	216	0
11.	Wonoasri	3519110	Tempat Tidur	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Tempat Tidur	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Tempat Tidur	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Tempat Tidur	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Tempat Tidur	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.12.3

**Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas per Kecamatan			
				Tempat Tidur RS Kelas A	Tempat Tidur RS Kelas B	Tempat Tidur RS Kelas C	Tempat Tidur RS Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Tempat Tidur	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Tempat Tidur	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Tempat Tidur	0	0	165	0
4.	Dagangan	3519040	Tempat Tidur	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Tempat Tidur	0	0	0	76
6.	Kare	3519060	Tempat Tidur	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Tempat Tidur	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Tempat Tidur	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Tempat Tidur	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Tempat Tidur	0	0	200	0
11.	Wonoasri	3519110	Tempat Tidur	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Tempat Tidur	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Tempat Tidur	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Tempat Tidur	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Tempat Tidur	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.12.4

**Data Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas per Kecamatan			
				Tempat Tidur RS Kelas A	Tempat Tidur RS Kelas B	Tempat Tidur RS Kelas C	Tempat Tidur RS Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Tempat Tidur	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Tempat Tidur	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Tempat Tidur	0	0	169	0
4.	Dagangan	3519040	Tempat Tidur	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Tempat Tidur	0	0	0	106
6.	Kare	3519060	Tempat Tidur	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Tempat Tidur	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Tempat Tidur	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Tempat Tidur	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Tempat Tidur	0	0	211	0
11.	Wonoasri	3519110	Tempat Tidur	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Tempat Tidur	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Tempat Tidur	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Tempat Tidur	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Tempat Tidur	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.13
Data Jumlah Porsyandu Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Posyandu per Kecamatan			
				Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Unit	65	65	65	65
2.	Geger	3519020	Unit	72	72	72	73
3.	Dolopo	3519030	Unit	76	76	76	76
4.	Dagangan	3519040	Unit	73	73	73	73
5.	Wungu	3519050	Unit	61	61	61	61
6.	Kare	3519060	Unit	45	45	45	46
7.	Gemarang	3519070	Unit	43	43	43	44
8.	Saradan	3519080	Unit	75	75	74	74
9.	Pilangkenceng	3519090	Unit	67	66	66	66
10.	Mejayan	3519100	Unit	50	50	50	50
11.	Wonoasri	3519110	Unit	40	40	40	40
12.	Balerejo	3519120	Unit	70	70	70	70
13.	Madiun	3519130	Unit	48	48	48	48
14.	Sawahan	3519140	Unit	34	33	33	33
15.	Jiwan	3519150	Unit	61	61	61	61

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.14

**Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit
Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Rumah Sakit	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rumah Sakit Umum	Kebonsari	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Geger	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Dolopo	Rumah Sakit	1	1	1	1
		Dagangan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Wungu	Rumah Sakit	0	0	1	1
		Kare	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Gemarang	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Saradan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Mejayan	Rumah Sakit	1	1	1	1
		Wonoasri	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Balerejo	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Madiun	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Sawahan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Jiwan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Jumlah	Rumah Sakit	2	2	3	3
2.	Rumah Sakit Khusus	Kebonsari	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Geger	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Dolopo	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Dagangan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Wungu	Rumah Sakit	1	1	0	0
		Kare	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Gemarang	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Saradan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Mejayan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Wonoasri	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Balerejo	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Madiun	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Sawahan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Jiwan	Rumah Sakit	0	0	0	0
		Jumlah	Rumah Sakit	1	1	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.15

Data Jumlah Puskesmas berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat inap Menurut Kecamatan

No.	Jenis Puskesmas	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Rawat Inap	Kebonsari	Puskesmas	1	1	1	1
		Geger	Puskesmas	0	0	0	0
		Dolopo	Puskesmas	0	0	0	0
		Dagangan	Puskesmas	1	1	1	1
		Wungu	Puskesmas	0	0	0	0
		Kare	Puskesmas	1	1	1	1
		Gemarang	Puskesmas	1	1	1	1
		Saradan	Puskesmas	2	2	2	2
		Pilangkenceng	Puskesmas	2	2	2	2
		Mejayan	Puskesmas	1	1	1	1
		Wonoasri	Puskesmas	0	0	0	0
		Balerejo	Puskesmas	1	1	1	1
		Madiun	Puskesmas	0	0	0	0
		Sawahan	Puskesmas	0	0	0	0
		Jiwan	Puskesmas	0	0	0	0
		Jumlah	Puskesmas	10	10	10	10
2.	Pelayanan Non Rawat Inap	Kebonsari	Puskesmas	1	1	1	1
		Geger	Puskesmas	2	2	2	2
		Dolopo	Puskesmas	2	2	2	2
		Dagangan	Puskesmas	1	1	1	1
		Wungu	Puskesmas	2	2	2	2
		Kare	Puskesmas	0	0	0	0
		Gemarang	Puskesmas	0	0	0	0
		Saradan	Puskesmas	0	0	0	0
		Pilangkenceng	Puskesmas	0	0	0	0
		Mejayan	Puskesmas	1	1	1	1
		Wonoasri	Puskesmas	1	1	1	1
		Balerejo	Puskesmas	1	1	1	1
		Madiun	Puskesmas	2	2	2	2
		Sawahan	Puskesmas	1	1	1	1
		Jiwan	Puskesmas	2	2	2	2
		Jumlah	Puskesmas	16	16	16	16

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.16.1

**Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit per Kecamatan			
				Rumah Sakit Kelas A	Rumah Sakit Kelas B	Rumah Sakit Kelas C	Rumah Sakit Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	0	0	1	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	1	0
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.16.2

**Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit per Kecamatan			
				Rumah Sakit Kelas A	Rumah Sakit Kelas B	Rumah Sakit Kelas C	Rumah Sakit Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	0	0	1	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	1	0
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.16.3

**Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit per Kecamatan			
				Rumah Sakit Kelas A	Rumah Sakit Kelas B	Rumah Sakit Kelas C	Rumah Sakit Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	0	0	1	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	1	0
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.16.4

**Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit per Kecamatan			
				Rumah Sakit Kelas A	Rumah Sakit Kelas B	Rumah Sakit Kelas C	Rumah Sakit Kelas D
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	0	0	1	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	1	0
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.17.1
Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi per Kecamatan				
				Perdana	Dasar	Madya	Utama	Paripurna
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.17.2
Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi per Kecamatan				
				Perdana	Dasar	Madya	Utama	Paripurna
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.17.3
Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi per Kecamatan				
				Perdana	Dasar	Madya	Utama	Paripurna
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	1	0	0	0	0
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.17.4
Data Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi per Kecamatan				
				Perdana	Dasar	Madya	Utama	Paripurna
1.	Kebonsari	3519010	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
4.	Dagangan	3519040	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
5.	Wungu	3519050	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
6.	Kare	3519060	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
10.	Mejayan	3519100	Rumah Sakit	0	0	0	0	1
11.	Wonoasri	3519110	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
13.	Madiun	3519130	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Rumah Sakit	0	0	0	0	0

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.18

Data Jumlah Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan

No.	Jenis Penyakit	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Hipertensi	Kebonsari	Orang	1.416	1.432	2.478	4.284
		Geger	Orang	1.700	1.474	3.086	4.094
		Dolopo	Orang	1.544	1.399	2.918	5.476
		Dagangan	Orang	1.341	1.250	4.215	6.625
		Wungu	Orang	1.649	1.574	2.874	4.388
		Kare	Orang	874	821	4.778	5.977
		Gemarang	Orang	885	832	1.754	3.001
		Saradan	Orang	1.872	1.689	11.909	22.580
		Pilangkenceng	Orang	1.573	1.434	3.573	8.095
		Mejayan	Orang	1.360	1.306	8.066	9.265
		Wonoasri	Orang	876	790	1.618	2.441
		Balerejo	Orang	1.359	1.302	4.218	5.969
		Madiun	Orang	1.211	1.152	2.045	3.072
		Sawahan	Orang	735	711	1.442	1.606
		Jiwan	Orang	1.701	1.531	4.275	25.934
		Jumlah	Orang	20.096	18.697	59.249	112.807
2.	Diabetes Melitus	Kebonsari	Orang	334	981	1.192	1.260
		Geger	Orang	262	958	1.470	1.669
		Dolopo	Orang	519	940	1.508	1.564
		Dagangan	Orang	301	819	1.177	1.241
		Wungu	Orang	347	848	1.330	1.417
		Kare	Orang	188	319	822	788
		Gemarang	Orang	142	531	815	779
		Saradan	Orang	272	1.067	1.586	1.527
		Pilangkenceng	Orang	425	1.029	1.004	954
		Mejayan	Orang	362	1.046	1.078	1.129
		Wonoasri	Orang	142	389	864	915
		Balerejo	Orang	416	1.041	1.164	1.159
		Madiun	Orang	266	795	1.099	1.219
		Sawahan	Orang	144	478	736	652
		Jiwan	Orang	471	1.030	1.451	1.330
		Jumlah	Orang	4.591	12.271	17.296	17.603

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.19.1

**Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks
Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks per Kecamatan		
				Balita Berat Badan Kurang	Balita Pendek dan Sangat Pendek	Balita Kurang Gizi Kurang
1.	Kebonsari	3519010	Balita	129	225	153
2.	Geger	3519020	Balita	162	419	124
3.	Dolopo	3519030	Balita	126	451	76
4.	Dagangan	3519040	Balita	102	300	64
5.	Wungu	3519050	Balita	125	423	97
6.	Kare	3519060	Balita	91	44	19
7.	Gemarang	3519070	Balita	89	239	63
8.	Saradan	3519080	Balita	260	562	151
9.	Pilangkenceng	3519090	Balita	176	415	114
10.	Mejayan	3519100	Balita	84	229	116
11.	Wonoasri	3519110	Balita	114	230	110
12.	Balerejo	3519120	Balita	142	305	135
13.	Madiun	3519130	Balita	97	86	126
14.	Sawahan	3519140	Balita	37	70	25
15.	Jiwan	3519150	Balita	152	467	140

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.19.2
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks per Kecamatan		
				Balita Berat Badan Kurang	Balita Pendek dan Sangat Pendek	Balita Kurang Gizi Kurang
1.	Kebonsari	3519010	Balita	177	320	197
2.	Geger	3519020	Balita	209	359	172
3.	Dolopo	3519030	Balita	137	296	89
4.	Dagangan	3519040	Balita	167	307	136
5.	Wungu	3519050	Balita	142	279	135
6.	Kare	3519060	Balita	99	198	74
7.	Gemarang	3519070	Balita	140	347	105
8.	Saradan	3519080	Balita	357	477	253
9.	Pilangkenceng	3519090	Balita	223	362	180
10.	Mejayan	3519100	Balita	57	87	132
11.	Wonoasri	3519110	Balita	152	187	176
12.	Balerejo	3519120	Balita	158	207	147
13.	Madiun	3519130	Balita	114	103	208
14.	Sawahan	3519140	Balita	33	11	6
15.	Jiwan	3519150	Balita	149	405	105

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.19.3
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks per Kecamatan		
				Balita Berat Badan Kurang	Balita Pendek dan Sangat Pendek	Balita Kurang Gizi Kurang
1.	Kebonsari	3519010	Balita	300	297	162
2.	Geger	3519020	Balita	345	393	189
3.	Dolopo	3519030	Balita	205	117	125
4.	Dagangan	3519040	Balita	257	312	104
5.	Wungu	3519050	Balita	246	367	215
6.	Kare	3519060	Balita	181	239	67
7.	Gemarang	3519070	Balita	217	307	109
8.	Saradan	3519080	Balita	407	527	186
9.	Pilangkenceng	3519090	Balita	410	319	239
10.	Mejayan	3519100	Balita	101	70	127
11.	Wonoasri	3519110	Balita	203	255	100
12.	Balerejo	3519120	Balita	230	225	148
13.	Madiun	3519130	Balita	194	63	222
14.	Sawahan	3519140	Balita	140	150	85
15.	Jiwan	3519150	Balita	274	284	173

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

Tabel. 13.4.19.4
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks per Kecamatan		
				Balita Berat Badan Kurang	Balita Pendek dan Sangat Pendek	Balita Kurang Gizi Kurang
1.	Kebonsari	3519010	Balita	266	188	140
2.	Geger	3519020	Balita	341	283	200
3.	Dolopo	3519030	Balita	242	131	170
4.	Dagangan	3519040	Balita	275	219	154
5.	Wungu	3519050	Balita	298	219	190
6.	Kare	3519060	Balita	180	110	92
7.	Gemarang	3519070	Balita	158	115	80
8.	Saradan	3519080	Balita	460	476	200
9.	Pilangkenceng	3519090	Balita	312	265	160
10.	Mejayan	3519100	Balita	235	201	154
11.	Wonoasri	3519110	Balita	190	139	110
12.	Balerejo	3519120	Balita	208	131	102
13.	Madiun	3519130	Balita	187	106	105
14.	Sawahan	3519140	Balita	95	30	85
15.	Jiwan	3519150	Balita	236	185	126

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan

14. DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 83 Tahun 2021, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas sosial memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Sosial mengampu 32 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD, 6 data indikator RPJMD, 3 data indikator SDGs, 20 data indikator SPM dan 1 indikator Data Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur. Secara lengkap 31 data indikator Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 14.1
Data Statistik Sektoral Dinas Sosial
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Tabel. 14.2
Data Statistik Sektor Dinas Sosial
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PPKS yang tertangani	%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana	%	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase personil Tanaga yang dibina	%	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	%	-	-	-	-	-	-
6.	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	%	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Tabel. 14.3
Data Statistik Sektor Dinas Sosial
Menurut Indikator SDGs

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Tabel. 14.4.1
Data Statistik Sektor Dinas Sosial
Menurut Indikator SPM

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan	Lembaga	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Orang	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	Orang	-	-	-	-	-	-
8.	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Orang	-	-	-	-	-	-
9.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	-	-	-	-	-	-
10.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Tabel. 14.4.2.1
Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial per Kecamatan		
				Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan dan Pengemis
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	2.564	2.656	0
2.	Geger	3519020	Jiwa	3.295	2.401	0
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	1.757	1.701	0
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	2.398	1.848	0
5.	Wungu	3519050	Jiwa	3.253	2.202	0
6.	Kare	3519060	Jiwa	2.580	1.914	0
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	2.998	2.180	0
8.	Saradan	3519080	Jiwa	5.013	3.025	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	3.443	2.301	0
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	3.292	1.811	0
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	2.117	1.489	0
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	3.261	1.893	0
13.	Madiun	3519130	Jiwa	1.545	1.157	0
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	1.151	819	0
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	2.939	2.055	0
Total			Jiwa	41.606	29.452	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.2.2
Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial per Kecamatan		
				Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan dan Pengemis
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	2.942	2.216	0
2.	Geger	3519020	Jiwa	2.544	3.765	0
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	1.702	1.931	0
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	2.547	2.158	0
5.	Wungu	3519050	Jiwa	3.085	3.377	0
6.	Kare	3519060	Jiwa	2.631	2.138	0
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	3.500	1.360	0
8.	Saradan	3519080	Jiwa	4.456	3.740	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	2.657	2.832	0
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	2.634	3.225	0
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	1.587	2.236	0
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	2.443	2.428	0
13.	Madiun	3519130	Jiwa	1.727	2.116	0
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	703	1.434	0
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	2.487	3.670	0
Total			Jiwa	37.645	38.626	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.2.3
Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial per Kecamatan		
				Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan dan Pengemis
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	3.546	3.551	0
2.	Geger	3519020	Jiwa	4.396	3.286	0
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	2.842	3.251	0
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	3.455	2.671	0
5.	Wungu	3519050	Jiwa	4.459	3.567	0
6.	Kare	3519060	Jiwa	3.803	3.236	0
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	3.705	3.210	0
8.	Saradan	3519080	Jiwa	6.959	6.056	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	4.446	4.862	0
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	4.627	3.887	0
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	2.989	2.491	0
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	4.093	4.169	0
13.	Madiun	3519130	Jiwa	2.533	2.288	0
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	1.511	1.497	0
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	3.880	3.972	0
Total			Jiwa	57.244	51.994	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.2.4
Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial per Kecamatan		
				Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan dan Pengemis
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	3.547	3.539	0
2.	Geger	3519020	Jiwa	4.396	3.281	0
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	2.842	3.252	0
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	3.455	2.672	0
5.	Wungu	3519050	Jiwa	4.459	3.565	0
6.	Kare	3519060	Jiwa	3.803	3.232	0
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	3.705	3.210	0
8.	Saradan	3519080	Jiwa	6.959	6.056	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	4.446	4.866	0
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	4.627	3.889	0
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	2.989	2.492	0
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	4.093	4.170	0
13.	Madiun	3519130	Jiwa	2.533	2.287	0
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	1.511	1.497	0
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	3.880	3.971	0
Total			Jiwa	57.245	51.979	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.3

**Data Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	234	179	274	269
		Geger	3519020	Jiwa	338	275	427	415
		Dolopo	3519030	Jiwa	195	175	250	243
		Dagangan	3519040	Jiwa	188	122	251	239
		Wungu	3519050	Jiwa	199	203	273	330
		Kare	3519060	Jiwa	123	131	174	225
		Gemarang	3519070	Jiwa	141	206	203	227
		Saradan	3519080	Jiwa	216	339	247	541
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	183	142	242	243
		Mejayan	3519100	Jiwa	145	210	168	171
		Wonoasri	3519110	Jiwa	154	132	202	187
		Balerejo	3519120	Jiwa	229	130	273	167
		Madiun	3519130	Jiwa	153	138	171	166
		Sawahan	3519140	Jiwa	96	85	140	132
		Jiwan	3519150	Jiwa	191	112	218	274
		Jumlah		Jiwa	2.785	2.579	3.513	3.829
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	195	203	270	323
		Geger	3519020	Jiwa	245	251	378	423
		Dolopo	3519030	Jiwa	166	167	223	261
		Dagangan	3519040	Jiwa	196	121	268	230
		Wungu	3519050	Jiwa	211	207	278	335
		Kare	3519060	Jiwa	108	122	166	207
		Gemarang	3519070	Jiwa	150	206	217	263
		Saradan	3519080	Jiwa	158	304	227	496
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	184	185	296	302
		Mejayan	3519100	Jiwa	136	225	205	193
		Wonoasri	3519110	Jiwa	137	109	207	195
		Balerejo	3519120	Jiwa	213	132	284	184
		Madiun	3519130	Jiwa	164	125	214	182
		Sawahan	3519140	Jiwa	101	89	164	155
		Jiwan	3519150	Jiwa	175	113	273	316
		Jumlah		Jiwa	2.539	2.559	3.670	4.065

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.4

**Data Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	1.303	2.219	1.783	1.785
		Geger	3519020	Jiwa	1.738	2.813	2.263	2.263
		Dolopo	3519030	Jiwa	877	1.721	1.464	1.474
		Dagangan	3519040	Jiwa	1.249	2.269	1.818	1.818
		Wungu	3519050	Jiwa	1.667	2.859	2.296	2.296
		Kare	3519060	Jiwa	1.269	2.275	1.902	1.902
		Gemarang	3519070	Jiwa	1.553	2.398	1.934	1.934
		Saradan	3519080	Jiwa	2.609	4.258	3.598	3.591
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	1.817	2.822	2.395	2.395
		Mejayan	3519100	Jiwa	1.707	2.816	2.384	2.384
		Wonoasri	3519110	Jiwa	1.121	1.897	1.564	1.568
		Balerejo	3519120	Jiwa	1.672	2.471	2.113	2.113
		Madiun	3519130	Jiwa	788	1.613	1.306	1.306
		Sawahan	3519140	Jiwa	615	928	824	830
		Jiwan	3519150	Jiwa	1.473	2.412	1.996	1.996
		Jumlah		Jiwa	21.458	35.771	29.640	29.655
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	1.261	2.208	1.763	1.763
		Geger	3519020	Jiwa	1.557	2.659	2.133	2.133
		Dolopo	3519030	Jiwa	880	1.642	1.378	1.378
		Dagangan	3519040	Jiwa	1.148	2.060	1.637	1.637
		Wungu	3519050	Jiwa	1.586	2.633	2.163	2.154
		Kare	3519060	Jiwa	1.311	2.265	1.901	1.901
		Gemarang	3519070	Jiwa	1.445	2.215	1.771	1.771
		Saradan	3519080	Jiwa	2.404	3.914	3.361	3.364
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	1.626	2.447	2.051	2.051
		Mejayan	3519100	Jiwa	1.585	2.649	2.243	2.243
		Wonoasri	3519110	Jiwa	996	1.693	1.425	1.430
		Balerejo	3519120	Jiwa	1.589	2.317	1.980	1.980
		Madiun	3519130	Jiwa	757	1.495	1.227	1.227
		Sawahan	3519140	Jiwa	536	812	687	687
		Jiwan	3519150	Jiwa	1.466	2.287	1.884	1.889
		Jumlah		Jiwa	20.147	33.296	27.604	27.608

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.5

**Data Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	764	817	2.030	2.020
		Geger	3519020	Jiwa	728	537	2.024	2.020
		Dolopo	3519030	Jiwa	626	627	1.600	1.602
		Dagangan	3519040	Jiwa	955	1.286	1.623	1.624
		Wungu	3519050	Jiwa	935	395	2.157	2.155
		Kare	3519060	Jiwa	808	1.318	2.147	2.143
		Gemarang	3519070	Jiwa	846	267	2.199	2.199
		Saradan	3519080	Jiwa	1.091	662	3.586	3.586
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	417	696	2.943	2.943
		Mejayan	3519100	Jiwa	772	1.078	2.331	2.332
		Wonoasri	3519110	Jiwa	934	825	1.549	1.549
		Balerejo	3519120	Jiwa	1.233	988	2.567	2.565
		Madiun	3519130	Jiwa	303	508	1.297	1.299
		Sawahan	3519140	Jiwa	578	765	885	885
		Jiwan	3519150	Jiwa	859	1.169	2.213	2.215
		Jumlah		Jiwa	11.849	11.938	31.151	31.137
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	1.129	1.611	1.521	1.519
		Geger	3519020	Jiwa	1.120	1.621	1.262	1.261
		Dolopo	3519030	Jiwa	1.075	1.304	1.651	1.650
		Dagangan	3519040	Jiwa	1.446	2.479	1.048	1.048
		Wungu	3519050	Jiwa	1.245	965	1.410	1.410
		Kare	3519060	Jiwa	1.247	2.352	1.089	1.089
		Gemarang	3519070	Jiwa	1.068	1.871	1.011	1.011
		Saradan	3519080	Jiwa	1.565	1.554	2.470	2.470
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	740	1.420	1.919	1.923
		Mejayan	3519100	Jiwa	1.039	2.147	1.556	1.557
		Wonoasri	3519110	Jiwa	1.367	2.007	942	943
		Balerejo	3519120	Jiwa	1.792	2.752	1.602	1.605
		Madiun	3519130	Jiwa	516	926	991	988
		Sawahan	3519140	Jiwa	911	1.471	612	612
		Jiwan	3519150	Jiwa	1.343	2.208	1.759	1.756
		Jumlah		Jiwa	17.603	26.688	20.843	20.842

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.6

**Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	0	0	0	0
		Geger	3519020	Jiwa	0	0	0	0
		Dolopo	3519030	Jiwa	0	0	0	0
		Dagangan	3519040	Jiwa	0	0	0	0
		Wungu	3519050	Jiwa	0	0	0	0
		Kare	3519060	Jiwa	0	0	0	0
		Gemarang	3519070	Jiwa	0	0	0	0
		Saradan	3519080	Jiwa	0	0	0	0
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	0	0	0	0
		Mejayan	3519100	Jiwa	0	0	0	0
		Wonoasri	3519110	Jiwa	0	0	0	0
		Balerejo	3519120	Jiwa	0	0	0	0
		Madiun	3519130	Jiwa	0	0	0	0
		Sawahan	3519140	Jiwa	0	0	0	0
		Jiwan	3519150	Jiwa	17	17	17	17
		Jumlah		Jiwa	17	17	17	17
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	0	0	0	0
		Geger	3519020	Jiwa	0	0	0	0
		Dolopo	3519030	Jiwa	0	0	0	0
		Dagangan	3519040	Jiwa	0	0	0	0
		Wungu	3519050	Jiwa	0	0	0	0
		Kare	3519060	Jiwa	0	0	0	0
		Gemarang	3519070	Jiwa	0	0	0	0
		Saradan	3519080	Jiwa	0	0	0	0
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	0	0	0	0
		Mejayan	3519100	Jiwa	0	0	0	0
		Wonoasri	3519110	Jiwa	0	0	0	0
		Balerejo	3519120	Jiwa	0	0	0	0
		Madiun	3519130	Jiwa	0	0	0	0
		Sawahan	3519140	Jiwa	0	0	0	0
		Jiwan	3519150	Jiwa	23	23	23	23
		Jumlah		Jiwa	23	23	23	23

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.7

Data Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana

No.	Jenis Bencana	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Angin Puting Beliung	Laki-Laki	Jiwa	18	122	22	42
		Perempuan	Jiwa	19	57	0	19
2.	Banjir	Laki-Laki	Jiwa	0	0	25	1
		Perempuan	Jiwa	0	0	12	8
3.	Korban Tanah Retak	Laki-Laki	Jiwa	0	0	0	0
		Perempuan	Jiwa	0	0	1	0
4.	Tanah Longsor	Laki-Laki	Jiwa	0	21	7	3
		Perempuan	Jiwa	0	12	0	1

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.8

Data Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis Bencana

No.	Jenis Bencana	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Kebakaran	Laki-Laki	Jiwa	9	5	6	27
		Perempuan	Jiwa	10	1	3	5
2.	Kelompok Rentas	Laki-Laki	Jiwa	0	0	2	0
		Perempuan	Jiwa	1	0	1	0
3.	TMMD	Laki-Laki	Jiwa	0	0	0	21
		Perempuan	Jiwa	0	0	0	0
4.	Rumah Roboh	Laki-Laki	Jiwa	0	0	0	6
		Perempuan	Jiwa	0	0	0	

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.9.1
Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial per Kecamatan			
				Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial	Penyuluh Sosial	Relawan Sosial
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	5	0	0	7
2.	Geger	3519020	Jiwa	6	0	0	7
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	5	0	0	11
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	5	0	0	9
5.	Wungu	3519050	Jiwa	7	0	0	9
6.	Kare	3519060	Jiwa	8	1	0	8
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	11	0	0	8
8.	Saradan	3519080	Jiwa	18	0	0	9
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	9	0	0	8
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	6	0	0	19
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	6	0	0	9
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	8	1	0	18
13.	Madiun	3519130	Jiwa	4	0	0	17
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	3	0	0	6
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	6	0	0	11
Total			Jiwa	107	2	0	156

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.9.2
Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial per Kecamatan			
				Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial	Penyuluh Sosial	Relawan Sosial
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	5	0	0	7
2.	Geger	3519020	Jiwa	6	0	0	7
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	5	0	0	11
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	5	0	0	9
5.	Wungu	3519050	Jiwa	7	0	0	9
6.	Kare	3519060	Jiwa	8	1	0	8
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	11	0	0	8
8.	Saradan	3519080	Jiwa	18	0	0	9
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	9	0	0	8
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	6	0	0	19
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	6	0	0	9
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	8	1	0	18
13.	Madiun	3519130	Jiwa	4	0	0	17
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	3	0	0	6
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	6	0	0	11
Total			Jiwa	107	2	0	156

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.9.3
Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial per Kecamatan			
				Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial	Penyuluh Sosial	Relawan Sosial
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	5	0	0	7
2.	Geger	3519020	Jiwa	6	0	0	7
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	5	0	0	11
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	5	0	0	9
5.	Wungu	3519050	Jiwa	7	0	0	9
6.	Kare	3519060	Jiwa	8	1	0	8
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	11	0	0	8
8.	Saradan	3519080	Jiwa	18	0	0	9
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	9	0	0	8
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	6	0	0	19
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	6	0	0	9
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	8	1	0	18
13.	Madiun	3519130	Jiwa	4	0	0	17
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	3	0	0	6
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	6	0	0	11
Total			Jiwa	107	2	0	156

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.9.4
Data Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial per Kecamatan			
				Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial	Penyuluh Sosial	Relawan Sosial
1.	Kebonsari	3519010	Jiwa	5	0	0	7
2.	Geger	3519020	Jiwa	6	0	0	7
3.	Dolopo	3519030	Jiwa	5	0	0	11
4.	Dagangan	3519040	Jiwa	5	0	0	9
5.	Wungu	3519050	Jiwa	7	0	0	9
6.	Kare	3519060	Jiwa	8	1	0	8
7.	Gemarang	3519070	Jiwa	11	0	0	8
8.	Saradan	3519080	Jiwa	18	0	0	9
9.	Pilangkenceng	3519090	Jiwa	9	0	0	8
10.	Mejayan	3519100	Jiwa	6	0	0	19
11.	Wonoasri	3519110	Jiwa	6	0	0	9
12.	Balerejo	3519120	Jiwa	8	1	0	18
13.	Madiun	3519130	Jiwa	4	0	0	17
14.	Sawahan	3519140	Jiwa	3	0	0	6
15.	Jiwan	3519150	Jiwa	6	0	0	11
Total			Jiwa	107	2	0	156

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.10

**Data Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	4	4	4	6
		Geger	3519020	Jiwa	5	5	5	7
		Dolopo	3519030	Jiwa	3	3	3	6
		Dagangan	3519040	Jiwa	5	5	5	9
		Wungu	3519050	Jiwa	5	5	6	10
		Kare	3519060	Jiwa	5	5	4	6
		Gemarang	3519070	Jiwa	6	6	5	5
		Saradan	3519080	Jiwa	12	12	4	5
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	6	6	3	8
		Mejayan	3519100	Jiwa	6	6	6	12
		Wonoasri	3519110	Jiwa	4	4	6	6
		Balerejo	3519120	Jiwa	4	4	12	13
		Madiun	3519130	Jiwa	3	3	3	15
		Sawahan	3519140	Jiwa	3	3	4	5
		Jiwan	3519150	Jiwa	4	4	5	5
		Jumlah		Jiwa	75	75	75	118
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	4	4	9	3
		Geger	3519020	Jiwa	5	5	4	5
		Dolopo	3519030	Jiwa	4	4	4	3
		Dagangan	3519040	Jiwa	4	4	5	5
		Wungu	3519050	Jiwa	5	5	8	5
		Kare	3519060	Jiwa	6	6	5	5
		Gemarang	3519070	Jiwa	8	8	6	9
		Saradan	3519080	Jiwa	10	10	4	8
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	7	7	5	8
		Mejayan	3519100	Jiwa	3	3	3	7
		Wonoasri	3519110	Jiwa	5	5	7	4
		Balerejo	3519120	Jiwa	9	9	10	9
		Madiun	3519130	Jiwa	5	5	2	4
		Sawahan	3519140	Jiwa	2	2	5	3
		Jiwan	3519150	Jiwa	5	5	5	9
		Jumlah		Jiwa	82	82	82	87

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.11
Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Anak Terlantar	Laki-Laki	Jiwa	21.458	19.507	29.639	29.655
		Perempuan	Jiwa	20.147	18.138	27.604	27.608
2.	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	Jiwa	11.849	11.938	31.151	31.137
		Perempuan	Jiwa	17.603	26.688	20.843	20.842
3.	Pengemis	Laki-Laki	Jiwa	0	0	0	0
		Perempuan	Jiwa	0	0	0	0

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.12

Data Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant per Kecamatan	
				Tahun	
				2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	1	15
2.	Geger	3519020	Orang	0	78
3.	Dolopo	3519030	Orang	3	52
4.	Dagangan	3519040	Orang	1	166
5.	Wungu	3519050	Orang	2	34
6.	Kare	3519060	Orang	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	4	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	4	0
10.	Mejayan	3519100	Orang	3	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	2	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	4	127
13.	Madiun	3519130	Orang	6	21
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	22
Total			Orang	30	515

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.13

**Data Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang
Memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	357	429	382	544	592
2.	Geger	3519020	Orang	462	583	526	805	838
3.	Dolopo	3519030	Orang	291	361	342	473	504
4.	Dagangan	3519040	Orang	295	384	243	519	469
5.	Wungu	3519050	Orang	314	410	410	551	665
6.	Kare	3519060	Orang	196	231	253	340	432
7.	Gemarang	3519070	Orang	242	291	412	420	490
8.	Saradan	3519080	Orang	303	374	643	474	1037
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	290	367	327	538	545
10.	Mejayan	3519100	Orang	229	281	435	373	364
11.	Wonoasri	3519110	Orang	212	291	241	409	382
12.	Balerejo	3519120	Orang	352	442	262	557	351
13.	Madiun	3519130	Orang	232	317	263	385	348
14.	Sawahan	3519140	Orang	157	197	174	304	287
15.	Jiwan	3519150	Orang	269	366	225	491	590
Total			Orang	4.201	5.324	5.138	7.183	7.894

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.4.14

**Data Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial
diluar Panti**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti per Kecamatan				
				Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	2405	2219	2942	2.165	3548
2.	Geger	3519020	Orang	3074	2689	2544	2.590	4396
3.	Dolopo	3519030	Orang	1733	1535	1702	1.529	2852
4.	Dagangan	3519040	Orang	2206	2024	2547	2.024	3455
5.	Wungu	3519050	Orang	3138	2753	3085	2.625	4450
6.	Kare	3519060	Orang	2505	2200	2631	2.359	3803
7.	Gemarang	3519070	Orang	2941	2582	3500	2.411	3705
8.	Saradan	3519080	Orang	4653	4153	4456	4.204	6955
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	3184	2905	2657	2.886	4446
10.	Mejayan	3519100	Orang	2756	2466	2634	2.442	4627
11.	Wonoasri	3519110	Orang	1976	1818	1587	1.758	2998
12.	Balerejo	3519120	Orang	2838	2593	2443	2.561	4093
13.	Madiun	3519130	Orang	1336	1212	1727	1.155	2533
14.	Sawahan	3519140	Orang	1053	953	703	902	1517
15.	Jiwan	3519150	Orang	2836	2489	2487	2.299	3885
Total			Orang	38.634	34.591	37.645	33.910	57.263

Sumber data : Indikator SPM Dinas Sosial

Tabel. 14.5.1

Data Jumlah Relawan Sosial

Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No.	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Tahun			
					2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	Kebonsari	3519010	Jiwa	2	2	2	2
		Geger	3519020	Jiwa	5	5	5	5
		Dolopo	3519030	Jiwa	4	4	4	4
		Dagangan	3519040	Jiwa	7	7	6	6
		Wungu	3519050	Jiwa	7	7	5	5
		Kare	3519060	Jiwa	4	4	4	4
		Gemarang	3519070	Jiwa	4	4	3	3
		Saradan	3519080	Jiwa	5	5	4	4
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	5	5	5	5
		Mejayan	3519100	Jiwa	12	12	12	12
		Wonoasri	3519110	Jiwa	4	4	4	4
		Balerejo	3519120	Jiwa	12	12	11	11
		Madiun	3519130	Jiwa	12	12	12	12
		Sawahan	3519140	Jiwa	4	4	3	3
		Jiwan	3519150	Jiwa	4	4	4	4
		Jumlah		Jiwa	91	91	84	84
2.	Perempuan	Kebonsari	3519010	Jiwa	5	5	5	5
		Geger	3519020	Jiwa	5	5	2	2
		Dolopo	3519030	Jiwa	9	9	7	7
		Dagangan	3519040	Jiwa	3	3	3	3
		Wungu	3519050	Jiwa	5	5	4	4
		Kare	3519060	Jiwa	4	4	4	4
		Gemarang	3519070	Jiwa	5	5	5	5
		Saradan	3519080	Jiwa	5	5	5	5
		Pilangkenceng	3519090	Jiwa	4	4	3	3
		Mejayan	3519100	Jiwa	7	7	7	7
		Wonoasri	3519110	Jiwa	6	6	5	5
		Balerejo	3519120	Jiwa	8	8	7	7
		Madiun	3519130	Jiwa	5	5	5	5
		Sawahan	3519140	Jiwa	3	3	3	3
		Jiwan	3519150	Jiwa	7	7	7	7
		Jumlah		Jiwa	81	81	72	72

Sumber data : Indikator Kesepakatan Forum Walidata Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial

15. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 86 Tahun 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mengampu 17 data indikator yang terdiri dari 4 data indikator LPPD, dan 13 data indikator RPJMD. Secara lengkap 17 data indikator Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 15.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	%	-	-	-	-	-	15,83
2.	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	-	-	-	53,20	46,70
3.	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	%	-	-	-	-	61,13	46,70
4.	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	%	-	-	-	1,08	21,72	38,77
5.	Persentase Peningkatan pengembangan UMKM	%	-	-	-	0,25	0,69	1,41
6.	Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	%	-	-	-	48,75	71	70
7.	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	-	-	-	55	117	65
8.	Persentase koperasi yang berkualitas	%	-	-	-	100	100	100
9.	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi lega	%	-	0,84	117,1	52,41	0,51	28,63
10.	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	%	-	-	-	50	300	75
11.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	-	-	-	100	147	149,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	-	-	-	20	83	20
13.	Persentase koperasi yang sehat	%	-	-	-	-	99,33	99,44

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel. 15.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	96,0772	132,3628
2.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	45,7944	40
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	76,9323	87,7234
4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	87,5568	97,4531

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

16. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu 34 data indikator yang terdiri dari 5 data indikator LPPD, 14 data indikator RPJMD dan 15 data indikator SPM. Secara lengkap 33 data indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 16.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikas	%	-	-	-	51,78	51,78	42,71
2.	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	%	-	-	-	66,67	66,67	70
3.	Persentase lembaga SD terakreditasi A	%	-	-	-	2,96	2,71	4,69
4.	Persentase lembaga SMP terakreditasi A	%	-	-	-	66,67	64,71	72,92
5.	Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	%	-	-	-	57	66,67	86
6.	Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan	%	-	-	-	100	100	100
7.	Indeks Pendidikan	-	-	0,625	0,626	0,627	0,631	0,633
8.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	-	-	-	97,36	97,36	89,23
9.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	-	-	-	100	100	100
10.	Cakupan pembinaan sejarah	%	-	-	-	100	100	100
11.	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	-	-	-	3,06	6,68	14,88
12.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	-	-	-	100	100	100
13.	Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan	%	-	-	-	100	100	100
14.	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	%	-	-	-	5,82	5,93	46,67

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.2

**Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terlestarikannya cagar budaya	%	-	-	-	-	100	100
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	-	-	36,15	46,67
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	-	-	-	98,44	98,53
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	-	-	-	99,25	99,83
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	-	-	-	-	100	100

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.1

**Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Indikator SPM**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Orang	-	75.995	90.787	89.335	90.569	73.511
2.	Jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun	Orang	-	-	-	55.420	59.726	47.022
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	-	-	-	-	-	17.954
4.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah	Orang	-	-	-	-	-	49.670
5.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.2

**Data Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Menurut Kecamatan**

No.	Klasifikasi Sekolah	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kebonsari	Lembaga	53	53	53	55
		Geger	Lembaga	58	58	58	58
		Dolopo	Lembaga	49	49	48	49
		Dagangan	Lembaga	52	52	52	52
		Wungu	Lembaga	47	47	47	47
		Kare	Lembaga	36	38	36	34
		Gemarang	Lembaga	37	37	37	37
		Saradan	Lembaga	54	54	54	54
		Pilangkenceng	Lembaga	51	51	51	50
		Mejayan	Lembaga	49	50	50	49
		Wonoasri	Lembaga	38	38	38	38
		Balerejo	Lembaga	50	51	50	49
		Madiun	Lembaga	41	41	41	41
		Sawahan	Lembaga	32	32	32	32
		Jiwan	Lembaga	41	41	41	41
2.	Sekolah Dasar (SD)	Kebonsari	Lembaga	24	24	24	24
		Geger	Lembaga	35	35	35	35
		Dolopo	Lembaga	38	28	28	28
		Dagangan	Lembaga	31	31	31	31
		Wungu	Lembaga	29	29	29	29
		Kare	Lembaga	27	27	27	27
		Gemarang	Lembaga	27	27	27	27
		Saradan	Lembaga	44	44	44	44
		Pilangkenceng	Lembaga	33	33	33	33
		Mejayan	Lembaga	26	26	26	26
		Wonoasri	Lembaga	17	17	17	17
		Balerejo	Lembaga	26	26	26	26
		Madiun	Lembaga	21	21	21	21
		Sawahan	Lembaga	15	15	15	15
		Jiwan	Lembaga	23	23	23	23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kebonsari	Lembaga	4	4	5	5
		Geger	Lembaga	3	3	4	4
		Dolopo	Lembaga	4	4	5	5
		Dagangan	Lembaga	5	5	5	5
		Wungu	Lembaga	2	2	2	2
		Kare	Lembaga	3	3	3	3
		Gemarang	Lembaga	3	3	3	3
		Saradan	Lembaga	5	5	5	5
		Pilangkenceng	Lembaga	2	2	2	2
		Mejayan	Lembaga	5	5	5	5
		Wonoasri	Lembaga	1	1	1	1
		Balerejo	Lembaga	3	3	3	3
		Madiun	Lembaga	2	2	2	2
		Sawahan	Lembaga	4	4	4	4
		Jiwan	Lembaga	2	2	2	2
4.	Pendidikan Kesetaraan	Kebonsari	Lembaga	0	0	0	0
		Geger	Lembaga	1	1	1	1
		Dolopo	Lembaga	1	1	1	1
		Dagangan	Lembaga	0	0	0	1
		Wungu	Lembaga	0	0	0	0
		Kare	Lembaga	0	0	0	0
		Gemarang	Lembaga	0	0	0	0
		Saradan	Lembaga	2	2	2	2
		Pilangkenceng	Lembaga	0	0	0	0
		Mejayan	Lembaga	1	1	1	1
		Wonoasri	Lembaga	0	0	0	0
		Balerejo	Lembaga	1	1	1	1
		Madiun	Lembaga	1	1	1	1
		Sawahan	Lembaga	1	1	1	1
		Jiwan	Lembaga	1	1	1	1

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.3

**Data Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Status Negeri/Swasta**

No.	Klasifikasi Sekolah	Status	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Negeri	Lembaga	5	5	0	5
		Swasta	Lembaga	683	687	688	681
2.	Sekolah Dasar (SD)	Negeri	Lembaga	402	402	402	401
		Swasta	Lembaga	4	4	4	4
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Negeri	Lembaga	37	37	37	37
		Swasta	Lembaga	11	11	14	14
4.	Pendidikan Kesetaraan	Negeri	Lembaga	0	0	0	0
		Swasta	Lembaga	9	9	9	10

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.4

**Data Jumlah Guru PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Klasifikasi Sekolah	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Laki-Laki	Orang	8	1	8	8
		Perempuan	Orang	1.165	1.841	1.63	1.112
2.	Sekolah Dasar (SD)	Laki-Laki	Orang	907	1.646	902	847
		Perempuan	Orang	2.154	2.390	2.130	2.049
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Laki-Laki	Orang	381	395	381	345
		Perempuan	Orang	736	1.053	734	697
4.	Pendidikan Kesetaraan	Laki-Laki	Orang	28	44	31	30
		Perempuan	Orang	48	98	49	49

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.5

**Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Agama**

No.	Klasifikasi Sekolah	Agama	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Islam	Orang	-	18.398	19.003	18.621
		Kristen	Orang	-	107	117	107
		Katolik	Orang	-	15	13	14
		Hindu	Orang	-	3	3	0
		Budha	Orang	-	0	0	0
2.	Sekolah Dasar (SD)	Islam	Orang	39.986	38.573	37.236	36.005
		Kristen	Orang	283	276	271	259
		Katolik	Orang	45	43	43	27
		Hindu	Orang	5	6	5	2
		Budha	Orang	3	0	0	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Islam	Orang	17.281	17.476	17.481	17.581
		Kristen	Orang	165	143	165	150
		Katolik	Orang	23	33	23	25
		Hindu	Orang	3	3	3	1
		Budha	Orang	0	0	1	0
4.	Pendidikan Kesetaraan	Islam	Orang	1.451	1.451	1.814	3.029
		Kristen	Orang	9	9	15	21
		Katolik	Orang	1	1	0	0
		Hindu	Orang	0	0	0	0
		Budha	Orang	0	0	0	1

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.6

**Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Status Negeri/Swasta**

No.	Klasifikasi Sekolah	Status	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Negeri	Orang	353	353	402	387
		Swasta	Orang	18.707	18.170	18.737	18.358
2.	Sekolah Dasar (SD)	Negeri	Orang	39.098	37.597	36.233	34.935
		Swasta	Orang	1.572	1.301	1.322	1.359
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Negeri	Orang	16.679	16.515	16.329	16.336
		Swasta	Orang	983	1.140	1.346	1.421
4.	Pendidikan Kesetaraan	Negeri	Orang	0	0	0	0
		Swasta	Orang	1.535	1.461	1.829	3.049

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.7

**Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Klasifikasi Sekolah	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Laki-Laki	Orang	9.854	9.595	9.884	9.583
		Perempuan	Orang	9.206	8.928	9.255	9.162
2.	Sekolah Dasar (SD)	Laki-Laki	Orang	19.427	20.128	19.443	18.797
		Perempuan	Orang	21.243	18.770	18.112	17.499
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Laki-Laki	Orang	9.285	9.248	9.288	9.293
		Perempuan	Orang	8.377	8.407	8.387	8.464
4.	Pendidikan Kesetaraan	Laki-Laki	Orang	983	983	1.226	1.920
		Perempuan	Orang	478	478	603	1.129

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.8

**Data Jumlah Siswa Paud, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Menurut Kecamatan**

No.	Klasifikasi Sekolah	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kebonsari	Orang	1.321	1.285	1.302	1.240
		Geger	Orang	1.717	1.720	1.739	1.666
		Dolopo	Orang	1.528	1.508	1.571	1.573
		Dagangan	Orang	1.321	1.319	1.322	1.277
		Wungu	Orang	1.203	1.114	1.223	1.176
		Kare	Orang	965	972	946	876
		Gemarang	Orang	944	968	969	948
		Saradan	Orang	1.685	1.676	1.690	1.621
		Pilangkenceng	Orang	1.302	1.282	1.331	1.287
		Mejayan	Orang	1.520	1.527	1.701	1.725
		Wonoasri	Orang	1.020	949	909	876
		Balerejo	Orang	1.064	1.035	1.065	1.070
		Madiun	Orang	1.013	980	1.018	995
		Sawahan	Orang	890	849	895	930
		Jiwan	Orang	1.567	1.337	1.458	1.485
2.	Sekolah Dasar (SD)	Kebonsari	Orang	2.206	1.790	1.721	1.673
		Geger	Orang	3.285	3.285	3.149	3.001
		Dolopo	Orang	3.013	3.003	2.902	2.808
		Dagangan	Orang	3.163	2.319	2.208	2.156
		Wungu	Orang	2.541	2.656	2.551	2.399
		Kare	Orang	2.376	2.376	2.373	2.314
		Gemarang	Orang	2.364	2.349	2.251	2.098
		Saradan	Orang	4.691	4.711	4.559	4.423
		Pilangkenceng	Orang	3.291	3.291	3.166	3.005
		Mejayan	Orang	3.910	3.910	3.837	3.852
		Wonoasri	Orang	1.815	1.815	1.740	1.655
		Balerejo	Orang	2.560	2.556	2.476	2.379
		Madiun	Orang	1.651	1.651	1.580	1.554
		Sawahan	Orang	900	945	899	886
		Jiwan	Orang	2.904	2.241	2.143	2.093

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kebonsari	Orang	1.365	1.243	1.363	1.452
		Geger	Orang	1.511	1.485	1.514	1.522
		Dolopo	Orang	1.606	1.545	1.605	1.695
		Dagangan	Orang	1.099	1.101	1.106	104
		Wungu	Orang	963	1.053	966	932
		Kare	Orang	681	696	681	733
		Gemarang	Orang	557	553	560	572
		Saradan	Orang	1.839	1.881	1.838	1.789
		Pilangkenceng	Orang	1.285	1.278	1.288	1.348
		Mejayan	Orang	2.052	2.087	2.051	2.152
		Wonoasri	Orang	762	741	760	744
		Balerejo	Orang	1.231	1.275	1.232	1.245
		Madiun	Orang	998	986	996	964
		Sawahan	Orang	805	817	808	723
		Jiwan	Orang	908	914	907	846
4.	Pendidikan Kesetaraan	Kebonsari	Orang	0	0	0	0
		Geger	Orang	120	172	139	193
		Dolopo	Orang	44	50	49	88
		Dagangan	Orang	0	0	0	9
		Wungu	Orang	0	0	0	0
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	0	0	0
		Saradan	Orang	75	75	280	644
		Pilangkenceng	Orang	0	0	0	0
		Mejayan	Orang	145	187	154	167
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	683	641	717	1.018
		Madiun	Orang	208	145	224	607
		Sawahan	Orang	81	83	136	175
		Jiwan	Orang	105	108	130	148

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.9

**Data Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Status Kesiswaan**

No.	Klasifikasi Sekolah	Status Kesiswaan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Baru	Orang	0	0	0	5.998
		Aktif	Orang	0	18.523	19.139	9.822
		Lulus	Orang	0	0	0	5.596
		Putus	Orang	0	0	0	0
		Mengulang	Orang	0	0	0	0
2.	Sekolah Dasar (SD)	Baru	Orang	0	6.450	6.450	5.509
		Aktif	Orang	0	38.898	37.555	36.294
		Lulus	Orang	0	7.534	7.534	6.822
		Putus	Orang	0	150	0	7
		Mengulang	Orang	0	132	132	26
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Baru	Orang	0	7.647	7.647	5.675
		Aktif	Orang	0	17.655	17.585	17.757
		Lulus	Orang	0	6.062	6.062	5.563
		Putus	Orang	0	151	0	29
		Mengulang	Orang	0	27	27	5
4.	Pendidikan Kesetaraan	Baru	Orang	0	0	0	561
		Aktif	Orang	0	478	1.829	3.049
		Lulus	Orang	0	0	0	318
		Putus	Orang	0	0	0	4
		Mengulang	Orang	0	0	0	328

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.10

**Data Jumlah Guru Paud, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Menurut Kecamatan**

No.	Klasifikasi Sekolah	Kecamatan	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kebonsari	Orang	85	128	85	79
		Geger	Orang	107	175	105	106
		Dolopo	Orang	110	165	111	106
		Dagangan	Orang	66	120	67	60
		Wungu	Orang	65	113	65	9
		Kare	Orang	57	91	57	47
		Gemarang	Orang	55	91	55	55
		Saradan	Orang	93	158	93	86
		Pilangkenceng	Orang	71	121	69	67
		Mejayan	Orang	114	167	117	116
		Wonoasri	Orang	75	109	76	67
		Balerejo	Orang	69	120	70	71
		Madiun	Orang	63	109	63	59
		Sawahan	Orang	52	85	51	51
		Jiwan	Orang	91	131	87	83
2.	Sekolah Dasar (SD)	Kebonsari	Orang	207	294	204	190
		Geger	Orang	260	353	258	234
		Dolopo	Orang	233	350	232	231
		Dagangan	Orang	246	345	242	222
		Wungu	Orang	210	274	210	194
		Kare	Orang	181	229	181	178
		Gemarang	Orang	184	216	183	174
		Saradan	Orang	329	413	328	317
		Pilangkenceng	Orang	228	293	228	231
		Mejayan	Orang	224	278	222	219
		Wonoasri	Orang	128	159	124	118
		Balerejo	Orang	185	254	183	179
		Madiun	Orang	158	210	155	136
		Sawahan	Orang	106	141	105	103
		Jiwan	Orang	182	227	170	170

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kebonsari	Orang	78	82	78	72
		Geger	Orang	92	117	91	87
		Dolopo	Orang	105	135	105	102
		Dagangan	Orang	84	81	84	74
		Wungu	Orang	60	96	60	54
		Kare	Orang	49	72	49	45
		Gemarang	Orang	48	68	48	47
		Saradan	Orang	103	148	103	96
		Pilangkenceng	Orang	77	103	76	72
		Mejayan	Orang	134	176	133	123
		Wonoasri	Orang	38	51	38	38
		Balerejo	Orang	76	99	77	70
		Madiun	Orang	57	83	57	52
		Sawahan	Orang	61	60	61	59
		Jiwan	Orang	55	77	55	51
4.	Pendidikan Kesetaraan	Kebonsari	Orang	0	0	0	0
		Geger	Orang	7	1	7	9
		Dolopo	Orang	5	0	105	5
		Dagangan	Orang	0	0	0	74
		Wungu	Orang	0	0	0	0
		Kare	Orang	0	0	0	0
		Gemarang	Orang	0	68	0	0
		Saradan	Orang	11	3	15	11
		Pilangkenceng	Orang	0	103	0	0
		Mejayan	Orang	5	2	5	5
		Wonoasri	Orang	0	0	0	0
		Balerejo	Orang	35	32	35	35
		Madiun	Orang	6	3	6	7
		Sawahan	Orang	3	1	3	3
		Jiwan	Orang	4	4	4	3

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 16.3.11

**Data Jumlah Guru PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Klasifikasi Sekolah	Pendidikan Terakhir	Satuan	Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	SMA	Orang	560	570	415	524
		D1	Orang	45	45	7	11
		D3	Orang	32	32	16	21
		S1	Orang	521	1.180	664	1.239
		S2	Orang	15	15	1	2
2.	Sekolah Dasar (SD)	SMA	Orang	0	0	14	43
		D1	Orang	3	7	0	1
		D3	Orang	41	18	1	19
		S1	Orang	2.974	3.957	2.268	3.372
		S2	Orang	43	54	30	77
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMA	Orang	0	0	19	17
		D1	Orang	7	6	4	3
		D3	Orang	3	9	6	5
		S1	Orang	1.035	1.357	1.009	1.001
		S2	Orang	72	76	69	95
4.	Pendidikan Kesetaraan	SMA	Orang	0	22	15	21
		D1	Orang	0	0	1	0
		D3	Orang	0	5	4	4
		S1	Orang	75	110	33	102
		S2	Orang	1	5	2	4

Sumber data : Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandi
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 10 data indikator yang terdiri dari 5 data indikator LPPD dan 5 data indikator RPJMD. Secara lengkap 10 data indikator Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 17.1
Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	15,09	16,66	17,64
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	-	69,96	76,42
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel. 17.2

**Data Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks SPBE	-	2,1	2,55	3,3	3,21	3,21	4,3
2.	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	-	-	-	100	100	100
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	%	-	-	-	100	100	100
4.	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	%	-	-	-	100	100	100
5.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	%	-	-	-	85,00	85,89	91,02

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika

18. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan perindustrian dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan perindustrian dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengampu 14 data indikator yang terdiri dari 4 data indikator LPPD, 8 data indikator RPJMD dan 2 data indikator SDGs. Secara lengkap 14 data indikator Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 18.1

**Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase transmigran umum yang berhasil	%	100	100	0	0	100	100
2.	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	-	-	-	2,15	0,03	2
3.	Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha	%	-	-	-	1,3	0,49	3
4.	Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	%	0	100	100	100	100	100
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,71	3,52	4,8	4,99	5,84	5,14
7.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	66,50	89,64	60,96	48,49	141,81	100
8.	Jumlah rencana pembangunan industri	Dokumen	0	0	0	1	1	1

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Data Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 18.1.1 berikut:

Tabel. 18.1.1

Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	76,91	90,69	68,52	50,79	146,33	100
2.	Geger	3519020	%	94,79	94,76	76,61	56,63	111,71	100
3.	Dolopo	3519030	%	79,89	81,19	69,95	54,17	118,76	100
4.	Dagangan	3519040	%	79,81	82,29	72,76	50,26	110,46	100
5.	Wungu	3519050	%	74,45	95,79	53,79	22,79	143,12	100
6.	Kare	3519060	%	57,38	89,79	52,38	19,74	153,93	100
7.	Gemarang	3519070	%	26,11	86,81	53,33	20,24	155,17	100
8.	Saradan	3519080	%	72,73	93,95	56,36	19,26	97,06	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	69,16	95,68	65,89	49,28	164,36	100
10.	Mejayan	3519100	%	32,75	70,19	47,13	57,48	286,76	100
11.	Wonoasri	3519110	%	39,37	93,39	48,39	56,11	201,61	100
12.	Balerejo	3519120	%	47,66	95,59	49,5	78,57	191,33	100
13.	Madiun	3519130	%	61,25	87,68	34,97	75,61	100	100
14.	Sawahan	3519140	%	50,56	88,77	45,18	14,43	149,02	100
15.	Jiwan	3519150	%	52,97	95,29	62,65	46,15	150,76	100

Sumber data : Indikator RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tabel. 18.2

**Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Menurut Indikator SDGs**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAN	Orang	2.340	2.121	501	539	1.909	2.577
2.	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	0	0,03	0,02	0	4,31	0,03

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Data Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme AKAN dapat dibagi berdasarkan jenis kelamin dengan rincian tersaji pada tabel 18.2.1 berikut:

Tabel. 18.2.1

**Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme AKAN
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Tahun	Jenis Kelamin	Jumlah Pencari Kerja (Orang)
1.	2018	Laki-laki	482
		Perempuan	1.858
2.	2019	Laki-laki	336
		Perempuan	1.785
3.	2020	Laki-laki	75
		Perempuan	426
4.	2021	Laki-laki	81
		Perempuan	458
5.	2022	Laki-laki	810
		Perempuan	1.099
6.	2023	Laki-laki	1.011
		Perempuan	1.566

Sumber data : Indikator SDGs Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Data Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah peningkatan dengan rincian tersaji pada tabel 18.2.2 berikut:

Tabel. 18.2.2
Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No.	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Peningkatan	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)
1.	2018	15.750	0	0
2.	2019	16.223	473	0,03
3.	2020	16.487	264	0,02
4.	2021	16.487	0	0
5.	2022	87.474	70.987	4,31
6.	2023	899.69	2.495	0,03

Sumber data : Indikator Indikator SDGs Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tabel. 18.3
Data Statistik Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Menurut Indikator LPPD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	-	-	3,69	3,69
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	-	5,97	6,91	8,67
3.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100
4.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100

Sumber data : Indikator LPPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

19. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Madiun;
- g. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu 7 data indikator RPJMD. Secara lengkap 7 data indikator RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 19.1
Data Statistik Sektoral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Solidaritas	-	-	-	-	90,17	88,99	89,15
2.	Indeks Toleransi	-	-	-	-	77,40	80,88	80,91
3.	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	-	100	100	100	100
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-	94,82	94,82	94,83	94,84
5.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	-	-	100	100	100	100
6.	Indeks Keamanan Manusia	-	78,4	78,4	79,31	81,06	82,18	82,75
7.	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan SDM;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan SDM;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan SDM;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian dan SDM;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan di bidang kepegawaian dan SDM;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengampu 9 data indikator yang terdiri dari 3 data indikator LPPD dan 6 data indikator RPJMD. Secara lengkap 9 data indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 20.1

**Data Statistik Sektor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	51,76	56,69	56,74
2.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,31	18,24	18,28
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	97	97	100

Sumber data : Indikator LPPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) diperoleh dari perbandingan antara jumlah pegawai pendidikan tinggi keatas non Nakes & Guru dengan jumlah pegawai non Nakes & Guru dengan rincian tersaji pada tabel 20.1.1 berikut:

Tabel. 20.1.1

**Perhitungan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

No.	Tahun	Jumlah pegawai pendidikan tinggi keatas non nakes & guru	Jumlah pegawai non nakes & guru	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Tidak Termasuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan) %
1.	2021	1.012	1.955	51,76
2.	2022	1.109	1.956	56,69
3.	2023	1.114	1.963	56,74

Sumber data : Indikator LPPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) diperoleh dari perbandingan antara jumlah PNS Fungsional non Nakes & Guru dengan jumlah pegawai non Nakes & Guru dengan rincian tersaji pada tabel 20.1.2 berikut:

Tabel. 20.1.2
Perhitungan Rasio Pegawai Fungsional
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

No.	Tahun	Jumlah PNS fungsional non Nakes & Guru	Jumlah pegawai non nakes & guru	Rasio Pegawai Fungsional (Tidak Termasuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan) %
1.	2021	359	1.955	18,31
2.	2022	358	1.956	18,24
3.	2023	359	1.963	18,28

Sumber data : Indikator LPPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) diperoleh dari perbandingan antara jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi non Nakes & Guru dengan jumlah pegawai non Nakes & Guru dengan rincian tersaji pada tabel 20.1.3 berikut:

Tabel. 20.1.3
Perhitungan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

No.	Tahun	Jumlah Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Non Nakes & Guru	Jumlah Pegawai Fungsional non nakes & guru	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan) %
1.	2021	348	358	97
2.	2022	356	358	99
3.	2023	359	359	100

Sumber data : Indikator LPPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tabel. 20.2

**Data Statistik Sektor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	80,05	80,48	63,38	64,79	81,83
2.	Persentase penetapan kebutuhan ASN	%	95	93	0	96	100	100
3.	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase kedisiplinan ASN	%	99,92	99,95	99,92	99,84	99,83	99,86
5.	Persentase Penilaian Kinerja ASN	%	99,92	99,9	99,92	99,84	92,30	98,08
6.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	10,59	3,14	3,14	6,5	5	5,7

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Persentase Penetapan Kebutuhan ASN diperoleh dari perbandingan antara jumlah formasi yang ditetapkan dengan jumlah formasi yang diusulkan dengan rincian tersaji pada tabel 20.2.1 berikut:

Tabel. 20.2.1

Perhitungan Persentase Penetapan Kebutuhan ASN

No.	Tahun	Jumlah Formasi yang Ditetapkan	Jumlah Formasi yang Diusulkan	Persentase penetapan kebutuhan ASN (%)
1.	2018	331	349	95
2.	2019	341	367	93
3.	2020	0	0	0
4.	2021	934	974	96
5.	2022	497	497	100
6.	2023	664	664	100

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Persentase Kedisiplinan ASN diperoleh dari perbandingan antara jumlah ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dengan jumlah pegawai dengan rincian tersaji pada tabel 20.2.2 berikut:

Tabel. 20.2.2
Perhitungan Persentase Kedisiplinan ASN

No.	Tahun	Jumlah ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	Jumlah Pegawai	Persentase Kedisiplinan ASN (%)
1.	2018	6.995	7.000	99,92
2.	2019	6.997	7.000	99,95
3.	2020	6.995	7.000	99,92
4.	2021	6.989	7.000	99,84
5.	2022	6.794	6.800	99,83
6.	2023	7.020	7.030	99,86

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Persentase Penilaian Kinerja ASN diperoleh dari perbandingan antara jumlah ASN yang nilai kinerjanya ≥ 75 dengan jumlah ASN dengan rincian tersaji pada tabel 20.2.3 berikut:

Tabel. 20.2.3
Perhitungan Persentase Penilaian Kinerja ASN

No.	Tahun	Jumlah ASN yang Nilai kinerja ≥ 75	Jumlah ASN	Persentase Penilaian Kinerja ASN (%)
1.	2018	6.995	7.000	99,92
2.	2019	6.993	7.000	99,9
3.	2020	6.995	7.000	99,92
4.	2021	6.989	7.000	99,84
5.	2022	6.277	6.800	92,3
6.	2023	6.895	7.030	98,08

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Data Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi diperoleh dari perbandingan antara jumlah ASN yang mengikuti diklat dengan jumlah ASN dengan rincian tersaji pada tabel 20.2.4 berikut:

Tabel. 20.2.4

Perhitungan Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

No.	Tahun	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Jumlah ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (%)
1.	2018	741	7.000	10,59
2.	2019	220	7.000	3,14
3.	2020	220	7.000	3,14
4.	2021	455	7.000	6,5
5.	2022	340	6.800	5
6.	2023	395	6.895	5,7

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengampu 8 data indikator RPJMD. Secara lengkap 8 data indikator RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 21.1

**Data Statistik Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	-	-	-	76,22	77,09	82,51
2.	Indeks Kesalehan Sosial	-	-	61,67	61,90	65,86	68,16	71,96
3.	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase PD Bidang Ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/ diterbitkan/ dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengampu 7 data indikator yang terdiri dari 3 data indikator LPPD & SPM dan 4 data indikator RPJMD. Secara lengkap 7 data indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 22.1

**Data Statistik Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menurut Indikator LPPD dan SPM**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	424	26.404	1.815	5.034	3.729	5.665
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	450	450	1.550	350	400	120
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator LPPD dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 22.1.1 dan 22.1.2 berikut:

Tabel. 22.1.1

Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	304	0	0	40	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	13	4	1	220	8
3.	Dolopo	3519030	Orang	0	9	24	5	0	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	8	44	12	7	153	72
5.	Wungu	3519050	Orang	0	1726	0	154	17	100
6.	Kare	3519060	Orang	4	266	0	10	8	92
7.	Gemarang	3519070	Orang	4	254	8	58	60	0
8.	Saradan	3519080	Orang	60	5002	552	1592	1927	26
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	196	644	417	1130	1044	24
10.	Mejayan	3519100	Orang	44	200	4	296	166	808
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	512	4	963	4	3879
12.	Balerejo	3519120	Orang	40	15792	472	6	4	48
13.	Madiun	3519130	Orang	64	648	110	802	0	256
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	250	40	5	14	44
15.	Jiwan	3519150	Orang	4	740	168	5	72	308
Total				424	26.404	1.815	5.034	3.729	5.665

Sumber data : Indikator LPPD dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel. 22.1.2

Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	Orang	0	0	0	0	100	0
2.	Geger	3519020	Orang	0	0	0	0	100	0
3.	Dolopo	3519030	Orang	0	50	0	0	50	0
4.	Dagangan	3519040	Orang	150	0	700	0	0	30
5.	Wungu	3519050	Orang	50	0	0	50	0	0
6.	Kare	3519060	Orang	100	150	0	100	0	0
7.	Gemarang	3519070	Orang	50	0	300	0	0	0
8.	Saradan	3519080	Orang	100	0	0	50	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	Orang	0	0	0	50	50	60
10.	Mejayan	3519100	Orang	0	0	0	50	50	0
11.	Wonoasri	3519110	Orang	0	50	450	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	Orang	0	50	0	0	50	30
13.	Madiun	3519130	Orang	0	100	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	Orang	0	50	100	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	Orang	0	0	0	50	0	0
Total				450	450	1.550	350	400	120

Sumber data : Indikator LPPD dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel. 22.2

**Data Statistik Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Risiko Bencana	-	155,2	138,08	153,86	162	113,4	137,5
2.	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	%	100	0	0	80	100	100
3.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	%	0	2,27	36,36	2,27	4,54	9,09
4.	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk dapat dibagi berdasarkan Kecamatan dengan rincian tersaji pada tabel 22.2.1 berikut:

Tabel. 22.2.1

Data Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk per Kecamatan					
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	0	0	0	0	0	0
2.	Geger	3519020	%	0	0	0	0	0	0
3.	Dolopo	3519030	%	0	0	0	0	0	0
4.	Dagangan	3519040	%	0	0	100	0	0	12,5
5.	Wungu	3519050	%	0	0	0	0	0	0
6.	Kare	3519060	%	0	0	0	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	%	0	0	100	0	0	0
8.	Saradan	3519080	%	0	0	0	0	0	0
9.	Pilangkenceng	3519090	%	0	0	0	0	0	66,67
10.	Mejayan	3519100	%	0	0	0	12,5	12,5	0
11.	Wonoasri	3519110	%	0	0	100	0	0	0
12.	Balerejo	3519120	%	0	12,5	0	0	12,5	12,5
13.	Madiun	3519130	%	0	0	0	0	0	0
14.	Sawahan	3519140	%	0	0	100	0	0	0
15.	Jiwan	3519150	%	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, sub urusan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah mengampu 2 data indikator yang terdiri dari 1 data indikator LPPD dan 1 data indikator RPJMD. Secara lengkap 2 data indikator Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 23.1
Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan Daerah
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya	%	-12,86	-1,2	3,16	47,61	3,68	-9,73

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Pendapatan Daerah

Tabel. 23.2

**Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan Daerah
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	11,97	11,77	14,01	16,84	17,84	15,44

Sumber data : Indikator LPPD Badan Pendapatan Daerah

Data Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Pendapatan Dalam APBD dengan rincian tersaji pada tabel 23.2.1 berikut:

Tabel. 23.2.1

Perhitungan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan Dalam APBD	Rasio PAD
1.	2018	Rp. 219.048.907.266	Rp. 1.829.589.602.042	11,97
2.	2019	Rp. 229.206.394.170	Rp. 1.947.016.775.096	11,77
3.	2020	Rp. 258.211.505.535	Rp. 1.842.457.400.838	14,01
4.	2021	Rp. 333.154.568.459	Rp. 1.978.493.284.512	16,84
5.	2022	Rp. 346.647.998.570	Rp. 1.942.981.430.192	17,84
6.	2023	Rp. 323.778.222.368	Rp. 2.097.549.387.815	15,44

Sumber data : Indikator LPPD Badan Pendapatan Daerah

24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan dan aset;
- Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan dan aset;
- Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 7 data indikator yang terdiri dari 5 data indikator LPPD dan 2 data indikator RPJMD. Secara lengkap 7 data indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 24.1

Data Statistik Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel. 24.2

**Data Statistik Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	-	21,2	18,37
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,54	59,24	64,78
3.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,47	4,79	1,05
4.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	50,91	32,68	8,06
5.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	16,6	11,75	7,87

Sumber data : Indikator LPPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

25. INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2021, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan Inspektorat mengampu 6 data indikator RPJMD. Secara lengkap 6 data indikator RPJMD Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 25.1
Data Statistik Sektoral Inspektorat
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3
2.	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)	%	0	16,98	31,11	24,24	28,89	33,33
4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	-	-	87	91	93	100
5.	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan	Level	-	2	2	2	2	2
6.	Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku	%	-	-	-	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Inspektorat

Data Persentase OPD yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A) diperoleh dari perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A) dengan jumlah seluruh perangkat daerah dengan rincian tersaji pada tabel 25.1.1 berikut:

Tabel. 25.1.1

Perhitungan Persentase OPD yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)

No.	Tahun	Jumlah PD yang mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A)	Jumlah seluruh PD	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A) (%)
1.	2019	9	53	16,98
2.	2020	14	53	31,11
3.	2021	11	45	24,44
4.	2022	13	45	28,89
5.	2023	15	45	33,33

Sumber data : Indikator RPJMD Inspektorat

26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengampu 10 data indikator yang terdiri dari 2 data indikator LPPD, 5 data indikator RPJMD dan 3 data indikator SPM. Secara lengkap 10 data indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 26.1

**Data Statistik Sektoral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Menurut Indikator SPM**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Orang	-	-	-	259	328	502
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Orang	0	1	0	0	0	0
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Non kebakaran	Orang	18	56	23	37	25	134

Sumber data : Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel. 26.2

**Data Statistik Sektoral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Menurut Indikator LPPD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	-	-	-	16,27	16,22	16,38
2.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	27,78	17,86	86,96	70,27	92,00	52,24

Sumber data : Indikator LPPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Data Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diperoleh dari perbandingan antara jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Madiun dalam waktu tanggap (respon time) oleh petugas pemadam kebakaran dengan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Madiun dengan rincian tersaji pada tabel 26.2.1 berikut:

Tabel. 26.2.1

Perhitungan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No.	Tahun	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Madiun dalam waktu tanggap (respon time) oleh petugas pemadam kebakaran	jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Madiun	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
1.	2018	5	18	27,78
2.	2019	10	56	17,86
3.	2020	20	23	86,96
4.	2021	26	37	70,27
5.	2022	23	25	92
6.	2023	70	134	52,24

Sumber data : Indikator LPPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel. 26.3

**Data Statistik Sektoral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Stabilitas	-	-	-	-	78,37	81,22	81,46
2.	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	%	27,78	17,86	86,96	70,27	92,00	100
5.	Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	%	-	-	-	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

27. SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2021, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengampu 7 data indikator RPJMD. Secara lengkap 7 data indikator RPJMD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 27.1
Data Statistik Sektoral Sekretariat DPRD
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD	%	25	25	33	33	60	60
3.	Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase layanan keuangan DPRD	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase layanan kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Sekretariat DPRD

28. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Caruban merupakan rumah sakit kelas C yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Umum Daerah Caruban mengampu 5 data indikator RPJMD. Secara lengkap 5 data indikator RPJMD Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 28.1

Data Statistik Sektoral Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Keuangan Sesuai dengan Standar	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Tata Usaha Sesuai dengan Standar	%	67	75	75	75	87,5	100
3.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Pelayanan yang Memenuhi Standar	%	89	89	87,5	87,5	82,19	91,2
4.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Penunjang yang Memenuhi Standar	%	81	80	90	94	93,33	89
5.	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100	100	100	100	100	-

Sumber data : Indikator RPJMD RSUD Caruban

29. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo merupakan rumah sakit kelas C yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mengampu 5 data indikator RPJMD. Secara lengkap 5 data indikator RPJMD Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 29.1

Data Statistik Sektoral Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Keuangan Sesuai dengan Standar	%	75	75	100	100	100	100
2.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Tata Usaha Sesuai dengan Standar	%	75	75	87,5	87,5	100	100
3.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Pelayanan yang Memenuhi Standar	%	75	85,11	86,96	93,62	93,62	95,74
4.	Persentase Capaian Indikator SPM Bidang Penunjang yang Memenuhi Standar	%	75	96,77	100	100	94	100
5.	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD RSUD Dolopo

30. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2021, Sekretariat Daerah dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi perangkat daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah memiliki 3 asisten yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretariat Daerah terdiri dari 9 bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah mengampu 18 data indikator yang terdiri dari 17 data indikator RPJMD dan 1 data indikator Reformasi Birokrasi Tematik. Secara lengkap 18 data indikator Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 30.1
Data Statistik Sektoral Bagian Perekonomian dan SDA
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Perekonomian dan SDA

Tabel. 30.2
Data Statistik Sektoral Bagian Organisasi
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	53,17	60,01	61,42	61,91	63,36	82,32
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77,77	80,89	80,10	82,24	83,34	86,26
3.	Persentase Rumusan Kebijakan Ketata Laksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	0	0
4.	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
5.	Nilai SAKIP	%	70,01	71	72,28	73,06	76,03	76,09

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Organisasi

Tabel. 30.3
Data Statistik Sektoral Bagian Hukum
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum	Dokumen	103	111	76	95	79	160

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Hukum

Tabel. 30.4

**Data Statistik Sektorial Bagian Kesra
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	125	100	100
2.	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	%	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Kesra

Tabel. 30.5

**Data Statistik Sektorial Bagian Administrasi Pembangunan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Pembangunan

Tabel. 30.6

**Data Statistik Sektorial Bagian Pemerintahan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Pemerintahan

Tabel. 30.7

**Data Statistik Sektorial Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	%	119,67	106,56	100	100	172,13	224,26

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel. 30.8

**Data Statistik Sektorial Bagian Umum
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi	%	-	-	-	-	-	-

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Umum

Tabel. 30.9.1

**Data Statistik Sektorial Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Indikator RPJMD**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	-	-	-	0	0
2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	-	-	-	-	92,99	88,42
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	-	-	-	52,44	51,13
4.	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	Rumusan	2	3	3	3	6	4

Sumber data : Indikator RPJMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel. 30.9.2

**Data Statistik Sektorial Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Indikator Reformasi Birokrasi Tematik**

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Nilai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	-	-	-	-	442,48	52,15

Sumber data : Indikator RB Tematik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

31. KECAMATAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat, dimana camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Madiun terbagi ke dalam 15 (Lima Belas) Kecamatan, 8 (Delapan) Kelurahan dan 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) Desa. Berdasarkan daftar data yang telah ditetapkan, seluruh Kecamatan mengampu 5 data indikator RPJMD yang terdiri dari :

1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan;
2. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Secara lengkap 5 (lima) data indikator RPJMD pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 31.1

**Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Sesuai Ketentuan Berdasarkan Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100
5.	Wungu	3519050	%	100	100	100
6.	Kare	3519060	%	100	100	100
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100
10.	Mejayan	3519100	%	-	-	-
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100
13.	Madiun	3519130	%	166	200	150
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Masing-masing Kecamatan

Tabel. 31.2

**Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Berdasarkan Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100
5.	Wungu	3519050	%	100	100	100
6.	Kare	3519060	%	100	100	100
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100
10.	Mejayan	3519100	%	-	-	-
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100
13.	Madiun	3519130	%	154,5	150	120
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Masing-masing Kecamatan

Tabel. 31.3
Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100
5.	Wungu	3519050	%	0	100	0
6.	Kare	3519060	%	100	100	100
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100
10.	Mejayan	3519100	%	-	-	-
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100
13.	Madiun	3519130	%	133	166	225
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Masing-masing Kecamatan

Tabel. 31.4

**Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Berdasarkan Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100
5.	Wungu	3519050	%	100	100	100
6.	Kare	3519060	%	0	0	0
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100
10.	Mejayan	3519100	%	-	-	-
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100
13.	Madiun	3519130	%	166	150	120
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Masing-masing Kecamatan

Tabel. 31.5

**Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Berdasarkan Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Satuan	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Tahun		
				2021	2022	2023
1.	Kebonsari	3519010	%	100	100	100
2.	Geger	3519020	%	100	100	100
3.	Dolopo	3519030	%	100	100	100
4.	Dagangan	3519040	%	100	100	100
5.	Wungu	3519050	%	100	100	100
6.	Kare	3519060	%	100	100	100
7.	Gemarang	3519070	%	100	100	100
8.	Saradan	3519080	%	100	100	100
9.	Pilangkenceng	3519090	%	100	100	100
10.	Mejayan	3519100	%	-	-	-
11.	Wonoasri	3519110	%	100	100	100
12.	Balerejo	3519120	%	100	100	100
13.	Madiun	3519130	%	150	133	128,6
14.	Sawahan	3519140	%	100	100	100
15.	Jiwan	3519150	%	100	100	100

Keterangan (-) : Data Tidak Tersedia

Sumber data : Indikator RPJMD Masing-masing Kecamatan

32. BADAN PUSAT STATISTIK

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020, Badan Pusat Statistik Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2023, sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun mengampu 15 data indikator yang terdiri dari 7 data indikator Makro Pembangunan, 3 data indikator SDGs dan 5 data indikator RPJMD. Secara lengkap 15 data indikator Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel. 32.1
Data Statistik Sektor Badan Pusat Statistik
Menurut Indikator Data Makro Pembangunan

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	-	1,6	1,54	1,63	1,65	1,67	1,47
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan	-	0,34	0,34	0,35	0,38	0,37	0,31
3.	Angka Harapan Hidup (UHH SP 2010)	Tahun	70,97	71,22	71,38	71,5	71,9	72,28
	Angka Harapan Hidup (UHH SP 2020)	Tahun	-	-	74,01	74,09	74,34	74,59
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,13	13,14	13,16	13,17	13,18	13,23
5.	Rasio Gini	-	0,332	0,333	0,357	0,359	0,354	0,342
6.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,57	7,8	7,81	7,82	7,94	7,95
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,58	70,47	71,42	67,77	72,72	72,49

Sumber data : Indikator Data Makro Pembangunan

Tabel. 32.2
Data Statistik Sektorial Badan Pusat Statistik
Menurut Indikator SDGs

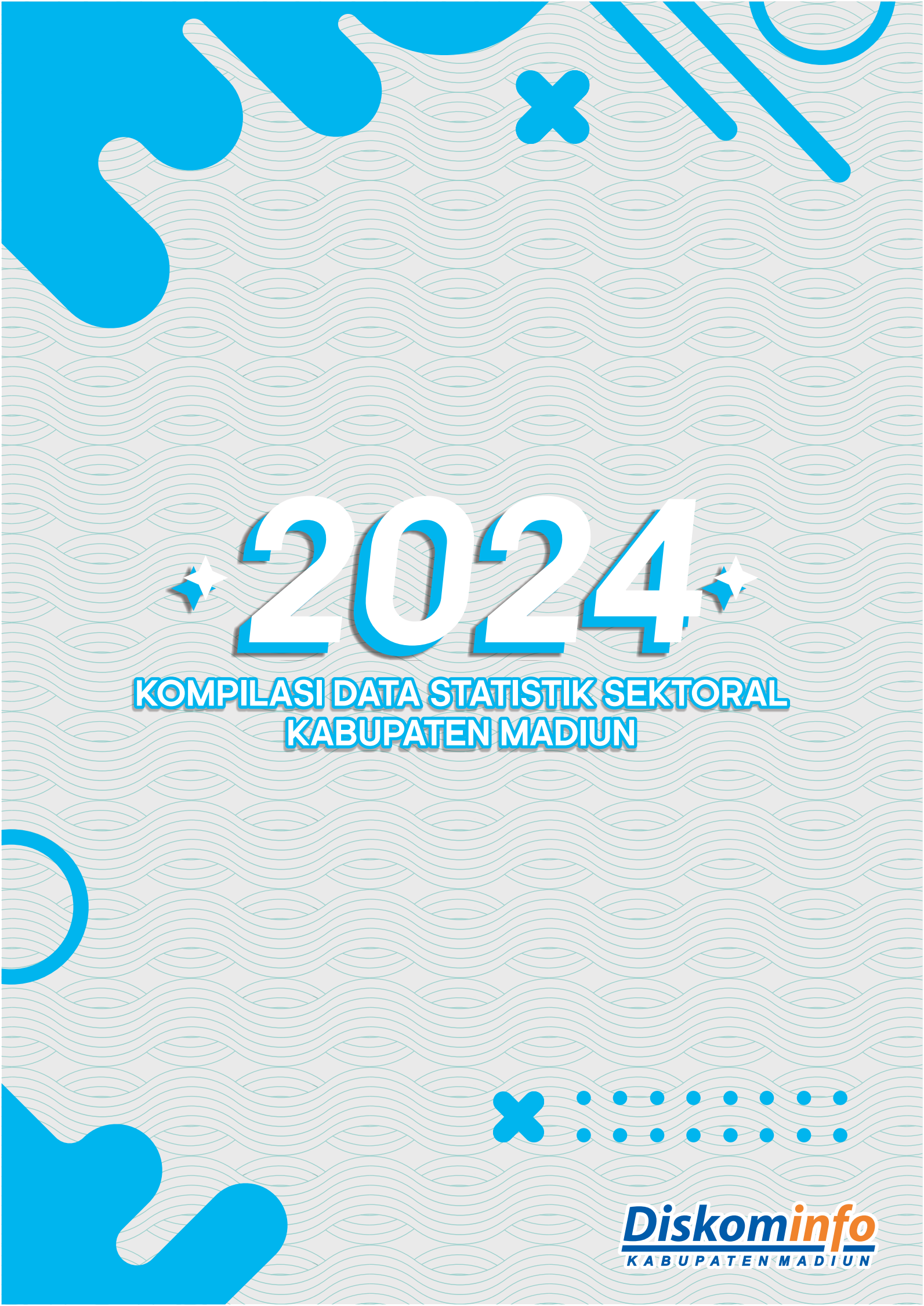
No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	%	-	101,51	99,67	98,55	99,87	101,49
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	%	-	96,5	100,33	101,33	93,56	103,29
3.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	91,5	90,5	92,16	90,73	92,53	90,84

Sumber data : Indikator Data SDGs

Tabel. 32.3
Data Statistik Sektor Badan Pusat Statistik
Menurut Indikator RPJMD

No.	Nama Data	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UHH SP 2010)	-	71,01	71,69	71,73	71,88	72,39	72,97
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UHH SP 2020)	-	-	-	72,94	73,07	73,51	74,02
2.	Pertumbuhan PDRB Unggulan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-2,26	2,22	1,13	1,63	-4,05	3,42
	Pertumbuhan PDRB Unggulan Sektor Industri Pengolahan	%	9,76	7,18	12,85	6,79	13,31	8,48
	Pertumbuhan PDRB Unggulan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,48	8,2	-5,75	5,65	5,76	4,84
3.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1	5,42	-1,69	3,34	4,32	5,12
4.	Angka Kemiskinan	%	11,42	10,54	11,46	11,91	10,79	11,04
5.	Pengeluaran Perkapita Makanan	Rp.	478.249	442.626	448.200	448.641	448.619	528.863

Sumber data : Indikator Data RPJMD



2024

**KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN MADIUN**